

**PENGARUH LITERASI POLITIK TERHADAP BUDAYA
POLITIK PARTISIPAN MAHASISWA PPKN
FKIP UNIVERSITAS LAMPUNG**

Skripsi

Oleh

ODI RIZAYANTO

NPM 1913032018



**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG**

2023

ABSTRAK

PENGARUH LITERASI POLITIK TERHADAP BUDAYA POLITIK PARTISIPAN MAHASISWA PPKn FKIP UNIVERSITAS LAMPUNG

Oleh

Odi Rizyanto

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pengaruh literasi politik terhadap budaya politik partisipan mahasiswa PPKn FKIP Universitas Lampung. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Subjek penelitian ini yakni mahasiswa program studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) Universitas Lampung angkatan 2019 sampai angkatan 2022. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 78 responden. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik angket dan wawancara. Teknik analisis data pada penelitian ini yakni menggunakan uji regresi sederhana dengan bantuan SPSS versi 25. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa literasi politik berpengaruh positif terhadap 53,1% terhadap budaya politik partisipan mahasiswa PPKn FKIP Universitas Lampung dimana mahasiswa PPKn FKIP Universitas Lampung memiliki budaya politik partisipan yang cukup baik. Selain itu mahasiswa PPKn FKIP Universitas Lampung memiliki bentuk partisipasi politik non-konvensional, dan dalam hal tipologi partisipasi politik mahasiswa PPKn FKIP Universitas Lampung mayoritas berpartisipasi secara aktif dan sebagian lain berpartisipasi secara pasif.

Kata Kunci: *Literasi Politik, Budaya Politik Partisipan, Mahasiswa, Partisipasi Politik, PPKn FKIP Universitas Lampung.*

ABSTRACT

THE INFLUENCE OF POLITICAL LITERACY ON CULTURE POLITICS OF PPKn STUDENT PARTICIPANTS FKIP LAMPUNG UNIVERSITY

By

Odi Rizayanto

This study aims to find out and analyze how political literacy influences the political culture of PPKn FKIP University Lampung University student participants. The research method used in this research is descriptive method with a quantitative approach. The subjects of this study were students of the Pancasila and Citizenship Education (PPKn) study program at the University of Lampung, class of 2019 to class of 2022. The sample in this study was 78 respondents. Data collection techniques in this study used questionnaires and interviews. The data analysis technique in this study was to use a simple regression test with the help of SPSS version 25. Based on the results of the research conducted, it showed that political literacy had a positive effect on 53.1% of the political culture of PPKn FKIP University student participants in Lampung where PPKn FKIP University Lampung students had a culture good participatory politics. In addition, PPKn FKIP University of Lampung students have unconventional forms of political participation, and in terms of political participation typology, the majority of PPKn FKIP University of Lampung students participate actively and some others participate passively.

Keywords: *Political Literacy, Participant's Political Culture, Students, Political Participation, PPKn FKIP University Of Lampung.*

**PENGARUH LITERASI POLITIK TERHADAP BUDAYA
POLITIK PARTISIPAN MAHASISWA PPKN
FKIP UNIVERSITAS LAMPUNG**

**Oleh
ODI RIZAYANTO**

SKRIPSI

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA PENDIDIKAN**

Pada

**Program Studi PPKn Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung**



**PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG**

2023

Judul Skripsi : **PENGARUH LITERASI POLITIK TERHADAP BUDAYA POLITIK PARTISIPAN MAHASISWA PPKN FKIP UNIVERSITAS LAMPUNG**

Nama Mahasiswa : *Odi Rizayanto*

NPM : **1913032018**

Program Studi : **Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan**

Jurusan : **Pendidikan IPS**

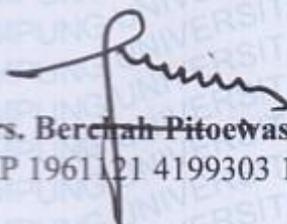
Fakultas : **Keguruan dan Ilmu Pendidikan**

MENYETUJUI

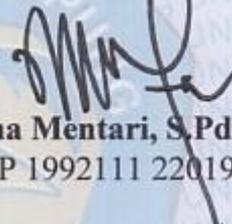
1. Komisi Pembimbing

Pembimbing I,

Pembimbing II,



Drs. Berchah Pitoewas, M.H.
NIP 1961121 4199303 1 001

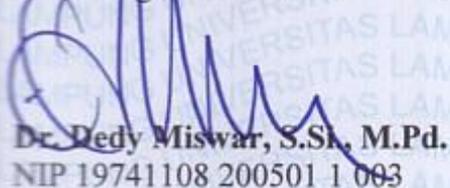


Ana Mentari, S.Pd., M.Pd.
NIP 1992111 2201903 2 026

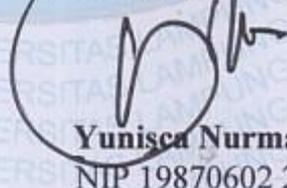
2. Mengetahui

Ketua Jurusan Pendidikan
Ilmu Pengetahuan Sosial

Ketua Program Studi
Pendidikan PKN



Dr. Dedy Miswar, S.Si., M.Pd.
NIP 19741108 200501 1 003

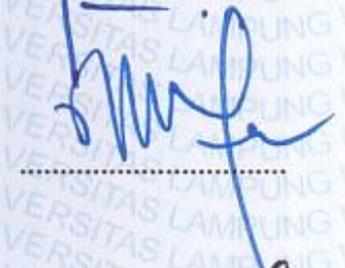
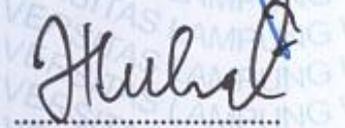


Yunisca Nuralisa, S.Pd., M.Pd.
NIP 19870602 200812 2 001

MENGESAHKAN

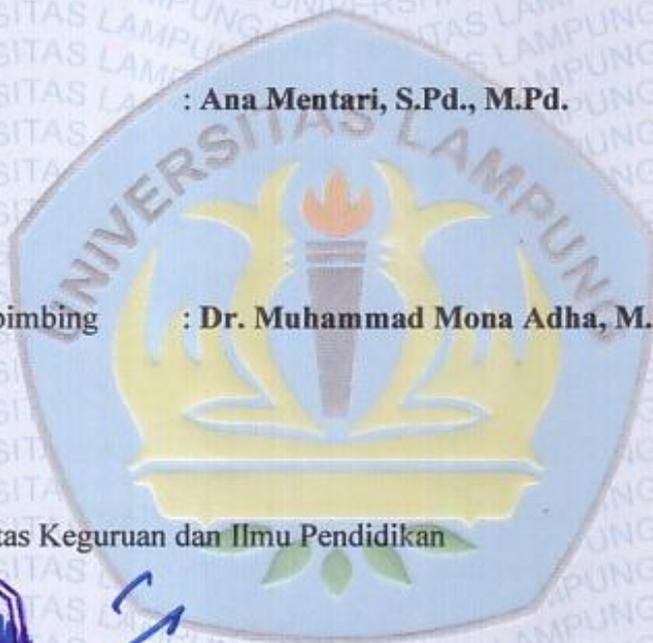
1. Tim Penguji

Ketua : Drs. Berchah Pitoewas, M.H.


.....

.....

.....

Sekretaris : Ana Mentari, S.Pd., M.Pd.

**Penguji
Bukan Pembimbing : Dr. Muhammad Mona Adha, M.Pd.**



2. Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan



Prof. Dr. Sanyono, M.Si.
NIP. 19651230 199111 1 001

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 23 Juni 2023

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini, adalah:

Nama : Odi Rizayanto
NPM : 1913032018
Program Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Jurusan : Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial
Fakultas : Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Alamat : Desa Sukarame RT 011 RW 004, Kec. Meraksa Aji, Kab.
Tulang Bawang, Prov. Lampung

Dengan ini menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar sarjana disuatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Bandar Lampung, 7 Juli 2023



Odi Rizayanto
NPM 1913032018

RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di Tulang Bawang, pada tanggal 18 Maret 2000. Anak ketiga dari empat bersaudara buah cinta kasih dari pasangan Bapak Puguh Siswanto dan Ibu Supingah.

Penulis menyelesaikan Pendidikan di Sekolah Dasar Negeri 1 Sukarame pada tahun 2012, kemudian melanjutkan Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Meraksa Aji pada tahun 2015. Penulis kembali melanjutkan Pendidikan di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Meraksa Aji pada tahun 2018 dan 1 tahun berselang tepatnya pada tahun 2019 penulis melanjutkan Pendidikan di salah satu perguruan tinggi negeri yang ada di Kota Bandar Lampung dan tercatat sebagai mahasiswa Program Studi PPKn Jurusan Pendidikan IPS Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung melalui jalur SBMPTN. Selama kuliah, penulis pernah menjadi Kepala Bidang Kajian dan Riset Dewan Energi Mahasiswa (DEM) Provinsi Lampung periode 2021/2022, dan memegang jabatan sebagai Kepala Bidang Pendidikan Himpunan Mahasiswa Pendidikan IPS (HIMAPIS) periode 2020/2021.

Penulis melaksanakan Kuliah Kerja Lapangan (KKL) dengan tujuan Yogyakarta-Bandung-Jakarta Tahun 2022. Melaksanakan salah satu mata kuliah wajib yakni Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Kelurahan Banjarsari, Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus. Dan penulis melaksanakan kegiatan Kampus Mengajar Angkatan 2 di Sekolah Dasar Islam Al-Qodiri pada tahun 2021 di semester 5. Kegiatan Kampus Mengajar ini sekaligus konvensi mata kuliah Pengenalan Lingkungan Persekolahan (PLP) 1 dan Pengenalan Lingkungan Persekolahan (PLP) 2.

MOTTO

“Lawan dari cinta itu bukan benci, tapi tidak peduli”

(Ana Mentari S.Pd., M.Pd.)

“Stay hungry, stay foolish”

(Steve Jobs)

“Hidup adalah sebuah permainan, maka bermainlah secara profesional”

(Odi Rizayanto)

PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahiim

Dengan mengucapkan syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya ku persembahkan karya kecil ini sebagai tanda bakti dan cintaku kepada:

“Kedua orang tuaku, yang sangat aku sayangi dan aku cintai Ayahku (Puguh Siswanto) dan Ibuku (Supingah) yang telah merawatku dengan penuh perhatian dan kasih sayang serta kesabaran yang luar biasa, membimbing, memotivasi, memberikan dukungan, dan selalu mendoakan disetiap sujudnya untuk keberhasilanku.

Tiada henti aku memohon kepada Allah SWT, agar ayah dan ibuku diberikan kesehatan, kebahagiaan, rezeki, dan perlindungan-Nya yang berlimpah selalu diberikan kepada kedua orang tuaku. Semoga Allah memberikan aku umur panjang dan diberikan kesempatan untuk selalu membahagiakan keduanya.

Aamiin Allahuma Aamiin.”

*dan tidak lupa yang selalu terpatri dalam jiwa
“Almamaterku Tercinta, Universitas Lampung”*

SANWACANA

Puji dan syukur penulis haturkan kehadiran Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya yang sangat berlimpah sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Pengaruh Literasi Politik Terhadap Budaya Politik Partisipan PPKn FKIP Universitas Lampung”**. Skripsi ini dibuat sebagai syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Pendidikan di Universitas Lampung.

Penulis sangat menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini terdapat banyak kekurangan. Pada kesempatan kali ini penulis hendak mengucapkan rasa terima kasih kepada Bapak Drs. Berchah Pitoewas, M.H. selaku dosen Pembimbing I dan Ibu Ana Mentari, S.Pd., M.Pd. selaku dosen Pembimbing II sekaligus dosen Pembimbing Akademik, serta semua pihak yang telah membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini hingga selesai. Penulis juga hendak menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Sunyono, M.Si. selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. Riswandi, M.Pd. selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kerjasama Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung.
3. Bapak Albert Maydiantoro, S. Pd., M.Pd. selaku Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung.
4. Bapak Hermi Yanzi, S.Pd., M.Pd. selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung.
5. Bapak Dr. Dedy Miswar, S.Si., M.Pd. selaku Ketua Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung.

6. Ibu Yunisca Nurmalisa, S.Pd., M.Pd. selaku Ketua Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung.
7. Bapak Drs. Berchah Pitoewas, M.H. selaku dosen Pembimbing I yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, pikiran serta motivasi, dan nasihat kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Ibu Ana Mentari, S.Pd., M.Pd., selaku pembimbing II. Terima kasih atas bimbingan, dukungan, semangat, ilmu, waktu, tenaga, arahan, serta nasehatnya selama ini.
9. Bapak Dr. Mona Adha, S.Pd. M.Pd. selaku dosen Pembahas I. Terima kasih atas masukan dan sarannya dalam pembuatan skripsi ini.
10. Bapak Edi Siswanto, S.Pd., M.Pd., selaku pembahas II. Terima kasih atas saran dan masukannya.
11. Bapak dan Ibu dosen khususnya dosen Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung yang dengan rela dan ikhlas memberikan ilmu yang dimilikinya kepada penulis.
12. Terima kasih kepada Ibu Nurhayati, S.Pd., M.Pd. selaku Koordinator Seminar yang telah membantu terselesainya skripsi ini.
13. Staf Program Studi PPKn Universitas Lampung yang telah membantu penulis selama melaksanakan penelitian.
14. Terkhusus dan yang paling istimewa yaitu kedua orang tuaku, Bapak Puguh Siswanto dan Ibu Supingah. Terima kasih atas keikhlasan, kesabaran ketulusan kasih sayang yang telah diberikan kepadaku, terima kasih telah merawat dan membesarkan ku hingga saat ini, terima kasih telah mengajarkan ku untuk menjadi seseorang yang sederhana dalam menjalani kehidupan serta terima kasih telah mendoakanku, memberikan motivasi, dukungan dan finansial yang tak terhingga.
15. Teruntuk kakak-kakakku tersayang, Mbak Sasti, dan Mas Erwin terima kasih atas semua dukungan, motivasi dan kasih sayang yang telah diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

16. Teruntuk kembaran kecil ku, Enggal Syaputra yang telah memberi semangat dan motivasi tersirat maupun tersurat sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.
17. Teruntuk NPM. 2113032028, terima kasih telah memberikan motivasi, semangat, dukungan, bersedia mendengarkan segala curahan hati dan sangat membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
18. Teruntuk Sahroni, dan Abdul Rohim, terima kasih sudah bersedia menjadi sahabat untuk berbagi kisah dan rasa dalam perjalanan hidup penulis sejak berada di bangku Sekolah Dasar (SD) hingga saat ini berjuang bersama mendapatkan gelar sarjana. Terima kasih telah menjadi sahabat yang sangat baik dalam selalu memotivasi.
19. Teruntuk “Keluarga Langit” BPH Masjid Al-Wasi’i khususnya saudara satu angkatan BPH 2019, Mohamad Wisnu Jati dan Rio Ramanda yang telah bersedia menjadi tempat untuk berbagi segala rasa dan tempat bersandar selama perjalanan hidup penulis. Terima kasih kalian telah hadir dalam hidup penulis dan terima kasih atas semua kebaikan serta hal-hal baik yang kalian berikan.
20. Terima kasih untuk sahabat-sahabat seperjuanganku di kampus “Rangga Saputra, Ahmad Yusuf, Krishna Parama Nanda, M. Arief Satria Wibowo, Alfina Damayanti, Salsabila, Anisa Siti Soleha, Willya Apriyani, Chika Tiara Sari” atas segala kebaikan yang telah menjadi sahabat yang selama ini menjalani masa perkuliahan. Terima kasih telah menjadi sahabat yang selalu menemani baik dalam keadaan suka maupun duka dan selalu memberikan semangat serta dukungan dalam pengerjaan skripsi ini.
21. Adik-adik hebatku dari SD Islam Al Qodiri, terima kasih atas antusiasmenya dan partisipasinya sehingga penulis bisa membuat sejarah dengan melakukan dua kegiatan sekaligus yakni menjadi pengajar yang sesungguhnya sekaligus menjadi agen perubahan yang mencoba merubah wajah pendidikan lewat agenda yang disediakan oleh pemerintah yakni Kampus Mengajar Angkatan 2 Tahun 2021.
22. Kawan seperjuangan dalam organisasi Dewan Energeri Mahasiswa (DEM), Kader Inti Pemuda Anti Narkoba (KIPAN) provinsi Lampung,

Forkom Bidikmisi/KIP Universitas Lampung, dan organisasi saya yang lain selama kuliah yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu.

23. Teman-teman Program Studi PPKn angkatan 2019 yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, terima kasih untuk kebersamaannya selama ini.
24. Terima kasih untuk keluarga besar FORDIKA FKIP Unila untuk setiap semangat yang disalurkan. Terima kasih untuk setiap kebersamaan suka, duka dan ketulusan yang kalian berikan.
25. Serta semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung telah memberikan bantuan moril maupun materil dalam penyusunan skripsi ini.

Penulis telah menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Penulis berharap semoga dengan kesederhanaannya skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak.

Bandar Lampung, 7 Juli 2023

Penulis

Odi Rizayanto
NPM. 1913032018

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal skripsi dengan judul **“Pengaruh Literasi Politik Terhadap Budaya Politik Partisipan Mahasiswa PPKn FKIP Universitas Lampung”** yang merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan studi penulis.

Penulis menyadari bahwa proposal skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Untuk itu, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan. Semoga Tuhan selalu memberkahi langkah kita dan memberikan kesuksesan dimasa mendatang dan semoga proposal skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Bandar Lampung, 7 Juli 2023

Penulis,

Odi Rizyanto
NPM. 1913032018

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR GAMBAR	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	6
C. Pembatasan Masalah.....	7
D. Rumusan Masalah	7
E. Tujuan Penelitian	7
F. Kegunaan Penelitian	7
1. Kegunaan Teoritis.....	7
2. Kegunaan Praktis.....	7
G. Ruang Lingkup Penelitian	8
1. Ruang Lingkup Ilmu.....	8
2. Ruang Lingkup Objek Penelitian	8
3. Ruang Lingkup Subjek Penelitian	8
4. Ruang Lingkup Tempat Penelitian	9
5. Ruang Lingkup Waktu Penelitian	9
II. TINJAUAN PUSTAKA.....	10
A. Deskripsi Teori	10
1. Tinjauan Umum Literasi Politik.....	10

a. Pengertian Politik	10
b. Pengertian Literasi Politik.....	12
c. Muatan Pokok Literasi Politik	14
d. Urgensi Literasi Politik	17
e. Pendekatan Literasi Politik	18
f. Agenda Literasi Politik.....	20
g. Tindakan Literasi Politik.....	22
h. Membumikan Literasi Politik	23
i. Indikator Literasi Politik.....	24
2. Tinjauan Umum Budaya Politik	24
a. Pengertian Budaya Politik	24
b. Tipologi Dan Budaya Politik	27
c. Transformasi Budaya Politik.....	34
d. Budaya Politik Indonesia	35
e. Bentuk-Bentuk Budaya Partisipan	37
f. Indikator Budaya Politik.....	38
B. Kajian Penelitian Relevan.....	39
C. Kerangka Pikir	40
D. Hipotesis	43
III. METODOLOGI PENELITIAN	44
A. Metode Penelitian	44
B. Populasi dan Sampel	44
1. Populasi	44
2. Sampel.....	45
C. Variabel Penelitian	47
1. Variabel Bebas (<i>Independent Variabel</i>).....	47
2. Variabel Terikat (<i>Dependent Variabel</i>).....	48
D. Definisi Konseptual dan Definisi Operasional.....	48
1. Definisi Konseptual.....	48
2. Definisi Operasional.....	49

E. Teknik Pengumpulan Data	49
1. Angket	51
2. Wawancara	52
F. Uji Validitas dan Uji Reliabilitas.....	52
G. Teknik Analisis Data.....	55
1. Analisis Distribusi Frekuensi	55
2. Uji Prasyarat	56
a. Normalitas.....	56
b. Linearitas	57
3. Analisa Data.....	58
a. Regresi Sederhana	58
b. Uji Hipotesis	59
c. Uji Koefisien Determinasi	60
H. Langkah-Langkah Penelitian	61
I. Pelaksanaan Uji Coba Penelitian	63
IV. PEMBAHASAN.....	66
A. Gambaran Umum dan Lokasi Penelitian	66
1. Profil Program Studi PPKn FKIP Universitas Lampung	66
2. Visi dan Misi Program Studi PPKn FKIP Universitas Lampung.....	66
a. Visi Program Studi PPKn FKIP Universitas Lampung	66
b. Misi Program Studi PPKn FKIP Universitas Lampung	67
3. Tujuan Program Studi PPKn FKIP Universitas Lampung.....	67
4. Sarana dan Prasarana Program Studi PPKn FKIP Universitas Lampung.....	68
5. Keadaan Dosen Program Studi PPKn FKIP Universitas Lampung.....	69
B. Deskripsi Data Penelitian	70
1. Pengumpulan Data	70
2. Penyajian Data.....	70

a. Penyajian Data Indikator Pengaruh Literasi Politik (Variabel X)	70
b. Penyajian Data Akumulasi Pengaruh Literasi Politik (Variabel X)	78
c. Penyajian Data Indikator Budaya Politik Partisipan (Variabel Y)	79
d. Penyajian Data Akumulasi Pengaruh Literasi Politik (Variabel Y)	87
C. Analisis Data Literasi Politik (Variabel X), dan Budaya Politik Partisipan (Y)	89
1. Uji Prasyarat	89
a. Uji Normalitas	89
b. Uji Linearitas	90
2. Uji Analisis Data	90
a. Uji Regresi Linier Sederhana	90
b. Uji Hipotesis	92
c. Uji Koefisien Determinasi	94
D. Pembahasan Hasil Penelitian	95
1. Variabel Literasi Politik (X).....	95
2. Variabel Budaya Politik Partisipasi (Y)	102
V. KESIMPULAN DAN SARAN	123
A. Kesimpulan.....	123
B. Saran	124

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
3.1 Populasi Mahasiswa Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan FKIP Universitas Lampung	45
3.2 Jumlah Sampel Mahasiswa Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan FKIP Universitas Lampung	47
3.3 Indeks Koefisiensi Reliabilitas	55
3.4 Uji Reliabilitas (Variabel X).....	45
3.5 Uji Reliabilitas (Variabel Y).....	47
4.1 Sarana dan Prasarana Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan FKIP Universitas Lampung	55
4.2 Keadaan Dosen Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan FKIP Universitas Lampung	45
4.3 Distribusi Frekuensi Indikator Kehirauan Dan Kesadaran Pentingnya Aktivitas dan Institusi Politik, Kewenangan, dan Peranannya	47
4.4 Distribusi Frekuensi Indikator Kemampuan Untuk Membuat Opini dan Otonomi Posisi Dalam Proses Politik Dalam Rangka Menghasilkan Suatu <i>Outcome</i> Politik	55
4.5 Distribusi Frekuensi Indikator Pengetahuan Mengenai Kebijakan, Perencanaan, dan Anggaran Pemerintah Untuk Pembangunan dan Pelayanan Publik	45
4.6 Distribusi Frekuensi Indikator Partisipasi Dalam Kegiatan Politik.....	47
4.7 Distribusi Frekuensi Akumulasi Literasi Politik (Variabel X).....	55
4.8 Distribusi Frekuensi Indikator Tingkat Pengetahuan Umum Mahasiswa Mengenai Sistem Politik Negeranya	45

4.9	Distribusi Frekuensi indikator pemahaman mahasiswa mengenai struktur dan peran pemerintah dalam membuat kebijakan .	47
4.10	Distribusi Frekuensi Indikator Pemahaman mengenai penguatan kebijakan yang meliputi masukan opini dari mahasiswa dan media massa kepada pemerintah	55
4.11	Distribusi Frekuensi Indikator Sejauh Mana Partisipasi Mahasiswa Dalam Berpolitik dan Bernegara, Serta Sejauh Mana Pemahamannya Mengenai Hak dan Kewajiban Sebagai Warga Negara.	47
4.12	Distribusi Frekuensi Akumulasi Budaya Politik Partisipan (Variabel Y)	55
4.13	Hasil Uji Normalitas Data Penelitian Yang Menggunakan SPSS Versi 25	55
4.14	Hasil Uji Linearitas Data Penelitian Yang Menggunakan SPSS Versi 25	45
4.15	Hasil Uji Regresi Sederhana Data Penelitian Menggunakan SPSS Versi 25	47
4.16	Hasil Perhitungan R Kuadrat Menggunakan SPSS Versi 25	55

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
2.1 Kerangka Pikir	43
3.1 Keterkaitan Antar Variabel	48
4.1 Diagram Venn Variabel X dan Y	121

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Izin Pendahuluan
2. Surat Izin Penelitian
3. Surat Keterangan Telah Melaksanakan Penelitian
4. Kisi-Kisi Angket Penelitian
5. Pedoman Wawancara
6. Tabulasi Data Hasil Uji Coba
7. Tabel Distribusi Frekuensi Variabel X (Literasi Politik)
8. Tabel Distribusi Frekuensi Variabel Y (Budaya Politik Partisipan)
9. Hasil Uji Analisis Data
10. Dokumentasi Penelitian

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di dalam dunia politik, faktor budaya memainkan peran yang sangat penting dari masa ke masa. Alur kebijakan politik suatu bangsa ditentukan oleh sistem struktural pada masanya, salah satunya adalah yang dikenal sebagai budaya politik. Budaya politik adalah persepsi warga negara yang diaktualisasikan dalam pola sikap terhadap masalah politik dan peristiwa politik yang terjadi (Ibid dalam Thomas Tokan Pureklolon, 2021).

Dalam konteks budaya politik di Indonesia, budaya politik secara tak langsung merupakan realitas yang paling dianggap intens dan mendasari sistem politik Indonesia. Pengamatan terhadapnya menurut Rusadi (1985), tidaklah berhenti pada hasil perolehan identifikasi pengamatan momen (*wowent opname*) tentang pola dan struktur kebudayaan dalam situasi tertentu dan terbatas. Sistem politik yang dipengaruhi atau dilandasi kebudayaan (politik), baru dapat dimengerti dan dipahami dengan baik setelah mengarungi kurun waktu tertentu (yang mungkin cukup panjang). Budaya politik dan struktur politik tidak pernah berada dalam keadaan diam (*stasioner*), tetapi selalu bergerak dan berinteraksi satu sama lain.

Budaya politik mencakup berbagai aspek dalam kehidupan bermasyarakat, seperti keagamaan, kegiatan ekonomi, bisnis, hubungan internasional, serta hubungan sosial masyarakat. Konsep ini dapat pula berarti bahwa berbagai aspek kegiatan masyarakat mempengaruhi kebijakan politik. Maka dari itu, budaya politik dapat mempengaruhi kehidupan politik di Indonesia. Terdapat

bermacam-macam budaya politik yang dianut masyarakat Indonesia untuk mengapresiasi cita-citanya. Budaya politik tersebut menjadi ciri khas bangsa Indonesia dalam kehidupan politik di Indonesia. Budaya politik yang baik mampu mendorong partisipasi dari warga negara dalam keseluruhan kehidupan secara politik (Ibid dalam Thomas Tokan Pureklolon, 2021).

Permasalahan yang muncul dalam budaya politik di Indonesia yakni minimnya masyarakat Indonesia yang memiliki budaya politik aktif, mayoritas bahkan tidak mengerti politik dikarenakan kondisi sosio-ekonomi yang kurang mendukung. Ada pula yang tidak peduli terhadap politik di Indonesia. Sekalipun masyarakat Indonesia terlibat aktif dalam aksi politik, hal itu dikarenakan adanya pengaruh *peer pressure* yang kemudian mengakibatkan sangat sedikit masyarakat Indonesia yang betul-betul memahami situasi politik di Indonesia. Rendahnya partisipasi politik pada masyarakat Indonesia ditengarai karena kurang memadainya tingkat sosialisasi budaya politik. Agar terciptanya budaya politik yang aktif maka harus di dukung oleh semua pihak terutama oleh pemerintah itu sendiri.

Permasalahan lain yang timbul, tingginya angka persentase Golongan Putih (Golput) pada pemilihan-pemilihan umum yang telah dilakukan. Ridha (2019) mengemukakan pendapatnya tentang data yang didapat dari LSI, 2015; Indikator Politik, 2016 & CSIS, 2017 yang pada tahun 2014 mencatat sebanyak 24,89 % golongan putih yang setara dengan 46.252.097 juta suara dari jumlah seluruh suara sah sebesar 124.972.491 juta suara. Kondisi tersebut secara tidak langsung menginformasikan dua hal, yaitu: ketidak-tahuan akan urgensi pemilihan umum dan ketidak-percayaan pada oknum yang menjalankan sistem. Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga-lembaga demokrasi seperti DPR dan Partai Politik yang berada pada titik rendah mengkonfirmasi poin yang kedua, sementara tingginya persentase Golput pada setiap agenda Pemilu yang telah kita lakukan secara tidak langsung juga mengkonfirmasi poin yang pertama.

Partisipasi politik warga negara sangat terkait erat dengan kepemilikan budaya politik. Budaya politik merupakan orientasi politik sikap individu terhadap

sistem politik dan komponen-komponennya, juga sikap individu yang dapat dimainkan dalam sebuah sistem politik tersebut (Almond & Verba, 1990). Budaya politik individu akan ditentukan oleh kepemilikan orientasi psikologis terhadap obyek sosial yang dalam hal ini adalah sistem politik. Orientasi tersebut yakni pertama, orientasi kognitif yang menyangkut pemahaman dan keyakinan individu terhadap sistem politik dan atributnya, kedua, orientasi afektif yang menyangkut ikatan emosional yang dimiliki oleh individu terhadap sistem politik, ketiga, orientasi evaluatif yang menyangkut kapasitas individu dalam rangka memberikan penilaian terhadap sistem politik yang sedang berjalan dan bagaimana peranan individu di dalamnya (Gaffar, 2006). Apabila orientasi kognitif, afektif, dan evaluatif dikembangkan secara maksimal dan seimbang pada diri warga negara maka akan muncul budaya politik yang mendukung terwujudnya sistem politik yang demokratis dan stabil yakni budaya politik partisipan.

Kehadiran budaya politik ini nampak pada masyarakat yang orang-orangnya melibatkan diri dalam kegiatan politik atau paling tidak dalam kegiatan pemberian suara, dan memperoleh informasi yang cukup banyak tentang kehidupan politik (Winarno, 2008). Warga negara yang telah memiliki budaya politik partisipatif, memiliki kompetensi politik yang tinggi dan digunakannya untuk memberikan evaluasi terhadap proses politik (Gaffar, 2006). Artinya, partisipasi politik warga negara merupakan bagian dari budaya politik partisipatif sehingga kepemilikan budaya politik partisipatif akan menghadirkan partisipasi politik yang mendorong terwujudnya sistem politik yang demokratis dan stabil.

Budaya politik kampus juga termasuk kedalam budaya politik yang dilakukan dan diperoleh dari sebuah pemikiran-pemikiran mahasiswa yang ingin tahu perkembangan politik yang terjadi. Oleh karena itu mahasiswa sebagai agen perubahan (*Agent of Change*) harus mampu memberikan sebuah perubahan dan berperan sebagai *pioneer* dalam proses penentuan sebuah kebijakan dan sekaligus mampu mengontrol sebuah perjalanan sistem politik yang sesuai dengan konstitusi yang berlaku. Dengan demikian peran mahasiswa dalam

berpolitik sangat diperlukan demi tercapainya demokrasi dan reformasi dalam membangun sebuah negara yang adil, aman dan tentram. Mahasiswa selaku generasi kepemimpinan negara masa depan, merupakan aset penting yang paling berharga bagi sebuah negara. Hebatnya golongan mahasiswa akan menjanjikan mantapnya kepemimpinan yang akan datang.

Pergerakan mahasiswa telah memainkan peranan penting sebagian kekuatan yang secara nyata mampu mendobrak rezim otoritarian. Jika kita lihat pengalaman historis perjuangan bangsa, kita akan menemukan bahwa mahasiswa selalu memainkan peranan penting dalam setiap bagian yang terpenting dalam perjalanan bangsa Indonesia. Meskipun demikian, dari kenyataan dilapangan harus diakui bahwa gerakan mahasiswa sebagai salah satu kekuatan reformasi bukanlah kekuatan yang solid. Keragaman latar belakang, motivasi, visi, politik serta orientasi masing-masing telah menjadikan gerakan mahasiswa tidak biasa dilihat sebagai identitas yang homogen. Maka dari itu sebuah literasi politik mahasiswa sangatlah berperan penting terhadap kemajuan dan perkembangan intelektualitas mahasiswa maupun kepekaan terhadap keadaan dinamika politik yang sedang terjadi, lalu pada proses kegiatan perbincangan politik mahasiswa juga terdapat berbagai macam tempat dan bermunculannya inovasi baru dalam perbincangan literasi politik.

Namun, terjadi hal yang cukup memprihatinkan dimana UNDP (2001) mengungkapkan bahwa dari seluruh Negara ASEAN, Indonesia menempati peringkat terakhir untuk *Human Development Index* (HDI), *Gender Related Development Index* (GDI) dan juga *Gender Empowerment Measure* (GEM). Artinya SDM Indonesia perlu ditingkatkan dari berbagai bidang termasuk bidang politik (literasi politik). Dalam bidang politik, persentase anggota legislatif antara laki-laki dan perempuan jauh berbeda, persentase anggota legislatif perempuan hanya 8,8% (BPS Tahun 2000). Angka tersebut tidak sampai 30% dari keseluruhan anggota legislatif. Oleh sebab itu perlu diketahui tingkat literasi politik dan bagaimana pengarusutamaan gender dapat meningkatkan literasi politik masyarakat.

Ketidakmampuan untuk menyadari dampak dari setiap sikap politik yang ditampilkan, langkah politik yang diambil serta kesalingterhubungan berbagai tindakan politik dan kesejahteraan menjadi faktor utama dari sikap dan tindakan acuh yang ditampilkan. Hal tersebut merupakan sesuatu yang sangat mendesak yang harus dilakukan sebagai ikhtiar untuk meningkatkan persentase partisipasi politik pemilih dan perbaikan kualitas pemilih yang berpartisipasi menjadi pemilih yang objektif-rasional dalam rangka memperbaiki kualitas penerapan demokrasi di masa depan. Disamping itu juga, kemampuan literasi politik yang baik juga akan turut berperan dalam penerapan sistem *checks and balances* dari masyarakat, oleh masyarakat dan untuk masyarakat dalam rangka turut serta memberikan masukan terhadap berbagai kebijakan pemerintah dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih sebagai langkah awal mewujudkan keadilan sosial bagi segenap masyarakat Indonesia.

Permasalahan di atas kemudian dianalisa dan dicoba dijawab melalui tujuan program studi PPKn FKIP Universitas Lampung di bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan kerjasama yang memiliki 4 komponen utama yang dua diantaranya yaitu untuk menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan dalam meningkatkan pemahaman masyarakat tentang kesadaran berbangsa dan bernegara dalam rangka implementasi pendidikan kewarganegaraan untuk mewujudkan *smart and good citizenship* melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Yang kedua, menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan seperti keterampilan legislasi, kontrak hukum dan jurnalistik, literasi politik, *role model* nilai-moral dan penggiat budaya yang professional (pkn.fkip.unila.ac.id, 2022). Maka, budaya politik yang mumpuni menjadi satu dari sekian poin penting sebagai kompetensi yang seharusnya dimiliki oleh mahasiswa Program Studi PPKn FKIP Universitas Lampung. Selain itu, sudah seyogyanya mahasiswa sebagai *agent of change* diharapkan untuk menjadi fasilitator maupun kontributor dalam menggalakkan literasi politik untuk meningkatkan budaya politik partisipan di Indonesia.

Berdasarkan hasil studi pendahuluan yang dilakukan oleh peneliti kepada mahasiswa Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)

FKIP Universitas Lampung, mengenai budaya politik mahasiswa ditemukan permasalahan bahwa budaya politik mahasiswa PPKn cenderung masih dalam tataran yang kurang baik dimana hal tersebut ditandai dengan adanya fakta bahwa masih banyak mahasiswa yang belum mengetahui peranannya sebagai warga negara dalam sistem politik serta segala kewajibannya, mahasiswa PPKn yang belum sepenuhnya mengerti perihal sistem politik yang dianut Indonesia, mahasiswa PPKn masih belum sepenuhnya yakin dan percaya dengan sistem politik yang sekarang diamini oleh bangsa Indonesia serta mahasiswa PPKn belum sepenuhnya peduli dengan kondisi implementasi sistem politik yang ada di Indonesia. Dapat ditarik benang merah dari hasil studi pendahuluan yang dilakukan peneliti bahwa ada sikap yang tidak selaras antara tujuan Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) FKIP Universitas Lampung, dan mahasiswa PPKn. Hemat peneliti, hal tersebut perlu dikaji dan diteliti lebih mendalam serta faktor apa saja yang mempengaruhinya khususnya dalam lingkup pengaruh literasi politik dan budaya politik partisipasi mahasiswa Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan FKIP Universitas Lampung.

Dari uraian diatas, maka peneliti bermaksud untuk melakukan penelitian yang berjudul “**Pengaruh Literasi Politik Terhadap Budaya Politik Partisipasi Mahasiswa PPKn FKIP Universitas Lampung**”. Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk menganalisis pengaruh yang ditimbulkan dari literasi politik terhadap budaya politik partisipasi mahasiswa PPKn FKIP Universitas Lampung. Penelitian ini akan dilakukan kepada mahasiswa PPKn FKIP Universitas Lampung angkatan 2019-2022. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah kajian keilmuan bagi masyarakat umum khususnya mahasiswa dan tenaga pendidik terhadap budaya politik partisipasi melalui literasi politik.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan yaitu sebagai berikut:

1. Adanya ketidaksesuaian antara kompetensi Mahasiswa dalam bidang literasi politik, budaya politik partisipan mahasiswa, dan tujuan program studi PPKn FKIP Universitas Lampung.
2. Mahasiswa belum sepenuhnya memiliki literasi politik yang baik.
3. Mahasiswa belum memahami dan memiliki pengetahuan budaya politik partisipan dengan baik.

C. Pembatasan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan dalam identifikasi masalah tersebut diatas, maka dalam penelitian ini akan dibatasi masalahnya pada Pengaruh Literasi Politik Terhadap Budaya Politik Partisipan Mahasiswa PPKn FKIP Universitas Lampung.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, identifikasi dan pembatasan masalah dalam penelitian ini maka dapat dirumuskan masalahnya adakah Pengaruh Literasi Politik Terhadap Budaya Politik Partisipan Mahasiswa PPKn FKIP Universitas Lampung?.

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dilakukannya penelitian ini adalah mengetahui dan menjelaskan Pengaruh Literasi Politik Terhadap Budaya Politik Partisipan Mahasiswa PPKn FKIP Universitas Lampung.

F. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis penelitian ini berguna untuk menambah khazanah kajian dan referensi bagi penelitian lain yang berminat untuk mengkaji dampak Pengaruh Literasi Politik Terhadap Budaya Politik Partisipan Mahasiswa PPKn FKIP Universitas Lampung.

2. Kegunaan Praktis

Adapun kegunaan praktis didalam penelitian ini adalah seperti berikut:

- a. Sebagai informasi bagi mahasiswa agar dapat memaksimalkan literasi politik dan diharapkan dapat berdampak baik pada proses budaya politik partisipan mahasiswa PPKn FKIP Universitas Lampung.
- b. Sebagai informasi untuk mahasiswa PPKn FKIP Universitas Lampung agar mampu mengembangkan budaya politik partisipan yang baik dengan menerapkan dan memiliki literasi yang baik dalam kehidupan sehari-hari.
- c. Sebagai bahan evaluasi bagi mahasiswa PPKn FKIP Universitas Lampung agar dapat merenungi hasil penelitian ini untuk kemudian menjadikan hasil penelitian ini sebagai acuan dalam berbudaya politik dengan baik dan tercermin dari perbaikan literasi politik dalam setiap diri Mahasiswa PPKn FKIP Universitas Lampung.
- d. Sebagai bahan acuan dalam penelitian selanjutnya dan diharapkan penelitian ini dapat diperbaiki serta diuji dalam penelitian yang akan datang.

G. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian dalam penelitian kali ini adalah sebagai berikut:

1. Ruang Lingkup Ilmu

Penelitian ini termasuk dalam ruang lingkup pendidikan kewarganegaraan dengan kajian pendidikan politik dan kenegaraan karena mengkaji Pengaruh Literasi Politik Terhadap Budaya Politik Partisipan Mahasiswa PPKn FKIP Universitas Lampung.

2. Ruang Lingkup Objek Penelitian

Ruang lingkup objek penelitian ini adalah Pengaruh Literasi Politik Terhadap Budaya Politik Partisipan Mahasiswa PPKn FKIP Universitas Lampung.

3. Ruang Lingkup Subjek Penelitian

Subjek pada penelitian ini adalah Mahasiswa Program Studi PPKn Universitas Lampung Angkatan 2019-2022.

4. Ruang Lingkup Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Program Studi PPKn FKIP Universitas Lampung yang beralamat di Jl. Prof. Dr. Ir. Soemantri Brojonegoro, No. 1, Gedong Meneng Kecamatan Rajabasa, Kota Bandar Lampung, Lampung.

5. Ruang Lingkup Waktu Penelitian

Pelaksanaan penelitian ini dilaksanakan sejak dikeluarkannya surat izin penelitian pendahuluan oleh Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung dengan Nomor **5347/UN26.13/PN.01.00/2022** pada tanggal 11 Agustus 2022 dan dilaksanakan penelitian pendahuluan pada tanggal 11-18 Agustus 2022. Sedangkan untuk surat izin penelitian dengan nomor **2043//UN26.13/PN.01.00/2023** dikeluarkan pada tanggal 3 Maret 2023 oleh Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung dan dilaksanakan penelitian pada tanggal 6-22 Maret 2023.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Deskripsi Teori

1. Tinjauan Umum Literasi Politik

a. Pengertian Politik

Dilansir dari Hidajat (2009), dari sisi etimologi kata politik berasal dari bahasa Yunani, yakni polis yang berarti kota yang berstatus negara kota (*city state*). Politik yang berkembang di Yunani kala itu dapat ditafsirkan sebagai suatu proses interaksi antara individu dengan individu lainnya demi mencapai kebaikan bersama.

Pemikiran mengenai politik pun khususnya di dunia barat banyak dipengaruhi oleh filsuf Yunani Kuno. Filsuf seperti Plato dan Aristoteles menganggap *politics* sebagai suatu usaha untuk mencapai masyarakat politik (*polity*) yang terbaik (Budiardjo, 2007). Namun demikian, definisi politik hasil pemikiran para filsuf tersebut belum mampu memberi tekanan terhadap upaya-upaya praksis dalam mencapai politik yang baik. Meskipun harus diakui, pemikiran-pemikiran politik yang berkembang dewasa ini juga tidak lepas dari pengaruh para filsuf tersebut.

Dalam perkembangannya, para ilmuwan politik menafsirkan politik secara berbeda-beda sehingga varian definisinya memperkaya pemikiran tentang politik. Almond (dalam Basri, 2011) mendefinisikan politik sebagai kegiatan yang berhubungan dengan kendali pembuatan keputusan publik dalam masyarakat tertentu di wilayah tertentu, di mana kendali ini disokong lewat instrumen yang sifatnya otoritatif dan

koersif. Dengan demikian, politik berkaitan erat dengan proses pembuatan keputusan publik. Penekanan terhadap penggunaan instrumen otoritatif dan koersif dalam pembuatan keputusan publik berkaitan dengan siapa yang berwenang, bagaimana cara menggunakan kewenangan tersebut, dan apa tujuan dari suatu keputusan yang disepakati. Jika ditarik benang merahnya, definisi politik menurut Almond juga tidak lepas dari interaksi dalam masyarakat politik (*polity*) untuk menyepakati siapa yang diberi kewenangan untuk berkuasa dalam pembuatan keputusan publik.

Definisi politik juga diberikan oleh ilmuwan politik lainnya, yaitu Andrew Heywood. Menurut Andrew Heywood dalam Budiardjo Miriam (2007), politik adalah kegiatan suatu bangsa yang bertujuan untuk membuat, mempertahankan, dan mengamandemen peraturan-peraturan umum yang mengatur kehidupannya, yang berarti tidak dapat terlepas dari gejala konflik dan kerja sama. Dengan definisi tersebut, Heywood (2018) secara tersirat mengungkapkan bahwa masyarakat politik (*polity*) dalam proses interaksi pembuatan keputusan publik juga tidak lepas dari konflik antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, maupun kelompok dengan kelompok lainnya. Dengan kata lain, masing-masing kelompok saling mempengaruhi agar suatu keputusan publik yang disepakati sesuai dengan kepentingan kelompok tertentu.

Konflik dan kerja sama dalam suatu proses pembuatan keputusan publik adalah satu kesatuan yang tak dapat dipisahkan sebagai bagian dari proses interaksi antar kepentingan. Aspirasi dan kepentingan setiap kelompok dan individu dalam masyarakat tidak selalu sama, melainkan berbeda bahkan dalam banyak hal bertentangan satu sama lain (Surbakti, 1992). Oleh sebab itu, sebuah kelaziman apabila dalam realitas sehari-hari sering dijumpai aktivitas politik yang tidak terpuji dilakukan oleh kelompok politik tertentu demi mencapai tujuan yang mereka cita-citakan. Peter Merkl (dalam Budiardjo, 2007) mengatakan bahwa politik dalam bentuk yang paling buruk, adalah perebutan

kekuasaan, kedudukan, dan kekayaan untuk kepentingan diri-sendiri (*politics at its worst is a selfish grab for power, glory, and riches*).

Berdasarkan pernyataan diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa politik adalah sebuah tahapan dimana untuk membentuk atau membangun posisi-posisi kekuasaan didalam masyarakat yang berguna sebagai pengambil keputusan-keputusan yang terkait dengan kondisi masyarakat.

b. Pengertian Literasi Politik

Awalnya term literasi ini, populer digunakan di bidang studi dokumen (perpustakaan) dan informasi. *Information Literacy* pertama kali digunakan oleh Paul Zurkowski, *President of The International Industry Association* pada tahun 1974 dalam proposalnya kepada *The US National Commission on Libraries and Information Science*. Saat itu literasi informasi dipahami sebagai seperangkat keterampilan dalam pencarian informasi dan penggunaan hak (Heryanto, 2019).

Menurut pendapat Bernard Crick dalam tulisannya *Essays on Citizenship*, definisi dasar tentang literasi politik adalah pemahaman praktis tentang konsep-konsep yang diambil dari kehidupan sehari hari dan bahasa (Bernard, 2000). Merupakan upaya memahami seputar isu utama politik, apa keyakinan utama para kontestan, bagaimana kecenderungan mereka mempengaruhi individu/kelompok lain.

Selain itu, mengutip pendapat Bernard Crick yang dikutip dari tulisan Gun Gun Heryanto (2019), literasi politik adalah senyawa dari pengetahuan, keterampilan dan sikap. Crick menegaskan literasi politik lebih luas dari hanya sekedar pengetahuan politik, melainkan cara "membuat diri menjadi efektif dalam kehidupan publik" dan dorongan untuk menjadi aktif, partisipatif dalam melaksanakan hak dan kewajiban baik dalam keadaan resmi maupun di arena publik yang sifatnya "suka rela".

Selain itu, literasi politik meniscayakan adanya elemen-elemen yang dapat diidentifikasi dan diukur. Dalam kaitan ini, Madhok (dalam

Heryanto, 2021) menawarkan setidaknya empat indikator literasi politik yaitu:

- 1) Kehirauan dan kesadaran pentingnya aktivitas dan institusi politik, kewenangan, dan peranannya.
- 2) Kemampuan untuk membuat opini dan otonomi posisi dalam proses politik dalam rangka menghasilkan suatu *outcome* politik.
- 3) Pengetahuan mengenai kebijakan, perencanaan, dan anggaran pemerintah untuk pembangunan dan pelayanan publik.
- 4) Partisipasi dalam kegiatan politik.

Dalam laporan "*Workshop on Political Literacy*" dengan topik *Political Literacy within ITT Citizenship Education* menyimpulkan agar literasi politik menjadi kenyataan, maka harus didefinisikan dan dibuat sebagai keahlian berbagi sehingga aktivitas ini sarat dengan konten dan disampaikan melalui transmisi model. Literasi politik ini memiliki potensi memberikan kewarganegaraan dengan dasar pengetahuan, ketelitian, sisi "keras" dan basis intelektual.

Report of Proceedings workshop ini pun menyimpulkan bahwa literasi politik terutama bagi kelompok muda melibatkan sejumlah hal:

- 1) Mengetahui di mana dan bagaimana keputusan dibuat dalam masyarakat lokal, nasional dan internasional.
- 2) Mengakui hak seseorang untuk terlibat.
- 3) Menjadi akrab dengan berbagai ide-ide politik, bahasa dan bentuk bentuk argumen.
- 4) Mengembangkan seperangkat pribadi yang memiliki nilai-nilai politik dan memiliki keterampilan serta kepercayaan diri menerapkannya dalam praktik.
- 5) Kemampuan untuk terlihat secara efektif dalam dialog, dengan orang lain tentang isu politik bersama yang menjadi perhatian.

Merujuk pada Macrae dkk dalam *Political Literacy Resource Pack* (2006), literasi adalah bauran kompleks dari praktik praktik sosial yang

memungkinkan orang untuk menjadi warga negara yang aktif dan efektif. Warga komunitas dilengkapi pengetahuan dan tindakan dalam kehidupan mereka dalam kaitannya dengan politik lokal, nasional dan internasional. Selain itu, Menurut Jenni S Bev (2011) literasi politik mengacu kepada seperangkat keterampilan yang diperlukan bagi warga untuk berpartisipasi dalam pemerintahan masyarakat. Singkatnya, ada kemampuan untuk mandiri di depan pemerintah. Ini tidak berarti kami bertujuan untuk menjadi seorang politisi karir, tetapi untuk berpikir dan bertindak sebagai konstituen informasi. Sehingga para pejabat pemerintah tidak bisa menjadi siapa mereka tanpa kita.

Dari uraian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa literasi politik adalah pengetahuan, keterampilan dan sikap yang berpartisipasi secara aktif dan efektif, kritis, bertanggungjawab yang dapat mempengaruhi urusan pemerintahan di semua tingkatan.

c. Muatan Pokok Literasi Politik

1) Partisipasi Politik

Secara mendasar definisi umum dari partisipasi politik adalah sebuah kegiatan seseorang atau kelompok untuk ikut serta secara aktif dalam sebuah ekosistem politik, yaitu dengan cara memilih pemimpin negara secara langsung ataupun tidak langsung, mempengaruhi kebijakan pemerintah. Kegiatan tersebut berkaitan dengan memberikan suara dalam pemilihan umum, menjadi anggota suatu partai atau kelompok kepentingan, melakukan hubungan atau *lobbying* dengan pejabat pemerintahan atau anggota parlemen (Budiardjo, 2007).

Menurut Herbert McCluskey yang dikutip dari buku karangan Miriam Budiardjo (2007), mengatakan bahwa seorang tokoh partisipasi berpendapat dalam *International Encyclopedia Of The Social Sciences*, partisipasi politik adalah kegiatan-kegiatan sukarela dari warga masyarakat, dimana mereka ambil bagian dalam proses

pemilihan, dan secara langsung atau tidak langsung dalam proses pembentukan kebijakan umum.

Sementara menurut Myron Weiner (dalam Mas'ood dan McAndrews, 1991) terkait partisipasi politik, terdapat lima gerakan menuju partisipasi yang lebih luas dalam proses politik yaitu:

- a) Modernisasi: industrialisasi, komersialisasi pertanian, dan urbanisasi yang dapat meningkatkan penyebaran kepadatan penduduk baca tulis, perbaikan pendidikan dan pengembangan media masa.
- b) Perubahan-perubahan struktur sosial
- c) Pengaruh dari golongan intelektual dan komunikasi masa modern seperti, jurnalis, pengarang, ilmuwan dan lain-lain.
- d) Keterlibatan pemerintah yang luas dalam urusan ekonomi, sosial dan kebudayaan.
- e) Terjadinya konflik di antara kelompok-kelompok pemimpin politik.

Dari uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa partisipasi politik yakni kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk turut serta secara aktif dalam kehidupan politik, dengan jalan memilih pimpinan negara, dan secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah, dan *public policy*.

2) Jenis-Jenis Partisipasi Politik

Dilihat dari bentuknya, partisipasi politik dibedakan menjadi dua jenis yaitu; pertama partisipasi secara konvensional yang dikenal waktu dan prosedur partisipasinya diketahui oleh publik secara pasti, contohnya kampanye dan pemilu. Kedua, partisipasi secara non konvensional yang dikenal tidak pernah mengindahkan etika berpolitik dalam partisipasinya. Contohnya adalah aksi Anarkisme (Burhanuddin, 2009).

Kegiatan partisipasi politik dapat dibedakan menjadi beberapa kategori, antara lain dilihat dari tinggi rendah partisipasi politik,

tingkatan, kegiatan dan partisipasi politiknya. Berikut ini Sastroatmojo (1995) memaparkan dari jenis partisipasi politik yaitu sebagai berikut:

- a) Dilihat dari tinggi rendah partisipasi politik dapat dibedakan menjadi partisipasi aktif, partisipasi yang pasif tertekan, partisipasi militan radikal, dan partisipasi yang tidak aktif. Aktif jika masyarakat memiliki tingkat kesadaran yang tinggi dan percaya pada sistem yang ada. Pasif tertekan jika kepercayaan dan kesadaran politik terhadap sistem sangat rendah. Militan radikal jika kesadaran politik masyarakat tinggi namun kepercayaan terhadap kesadaran sistem politik sangat rendah. Tidak aktif, apabila kesadaran politik masyarakat sangat rendah, namun kepercayaan terhadap sistem politik sangat tinggi.
- b) Dilihat dari tingkatannya dapat dibedakan menjadi gladiator, separator dan apatis. Gladiator berarti tingkatan partisipasi politik sampai pada keikutsertaannya dalam proses politik secara aktif, dan di bagi menjadi enam lapisan partisipasi politik antara lain: pemimpin politik, aktivis politik, komentator politik, warga negara marginal dan orang yang terisolasi. Separator adalah orang yang setidak-tidaknya menggunakan hak pilihnya untuk ikut serta dalam pemilihan umum. Sedangkan apatis adalah tidak peduli atau tidak menaruh perhatian sama sekali terhadap kegiatan politik dan bersikap masa bodoh.
- c) Dari sudut pandang kegiatannya, partisipasi politik dibagi menjadi partisipasi politik aktif dan partisipasi politik pasif. Aktif jika dapat mengajukan alternatif kebijakan umum, mengajukan petisi, membayar pajak dan sebagainya. Sedangkan pasif apabila ditunjukkan melalui kegiatan yang mencerminkan ketaatan dan penerimaan atas hal-hal yang menjadi keputusan pemerintah. Partisipasi aktif berkaitan dengan kegiatan masukan dan keluaran dari suatu sistem politik, sedangkan partisipasi pasif berkaitan dengan kegiatan atau aspek keluaran dari sistem politik.

d) Partisipasi politik dapat pula digolongkan sesuai dengan jumlah pelaku yang terlibat di dalamnya. Oleh sebab itu partisipasi politik dapat digolongkan menjadi partisipasi individu dan partisipasi kolektif.

Dari uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa jenis partisipasi politik yaitu pertama jika dilihat dari tinggi rendah partisipasi politik dapat dibedakan menjadi partisipasi aktif, partisipasi yang pasif tertekan, partisipasi militan radikal, dan partisipasi yang tidak aktif. Kedua yaitu dilihat dari tingkatannya dapat dibedakan menjadi gladiator, separator dan apatis. Ketiga dari sudut pandang kegiatannya, partisipasi politik dibagi menjadi partisipasi politik aktif dan partisipasi politik pasif. Keempat yaitu Partisipasi politik dapat pula digolongkan sesuai dengan jumlah pelaku yang terlibat di dalamnya.

d. Urgensi Literasi Politik

Tantangan atau problem yang terkait dengan modernisasi partai politik dan penyelenggara pemilu di atas tentu perlu diberikan solusinya yang tepat. Salah satu solusinya adalah literasi politik karena literasi politik seperti halnya sudah dijelaskan diawal adalah serangkaian kemampuan yang dipandang perlu bagi para warga untuk berpartisipasi dalam pemerintahan. Hal ini meliputi pemahaman bagaimana pemerintah bekerja dan isu-isu penting terkait masyarakat, juga kemampuan berpikir kritis terhadap berbagai praktik di pemerintahan atau dalam proses-proses politik secara umum.

Meskipun disebutkan bahwa warga yang menjadi fokus utama literasi politik, tetapi siapa pun sesungguhnya bisa menjadi sasaran literasi politik, dari warga dalam pengertian masyarakat biasa sampai mereka yang sedang menduduki jabatan politik di pemerintahan. Pendek kata, literasi politik seharusnya menjadi komitmen semua orang yang hidup di negara-negara demokrasi.

Dalam konteks ini, para penyelenggara pilkada atau pemilu perlu mendapatkan literasi politik. Tiga aspek literasi politik: kognitif, afektif,

dan psikomotorik, jika dipegang teguh oleh mereka maka kita bisa berharap bahwa pilkada-pilkada yang ada di seluruh daerah di Indonesia atau pemilu pada level nasional bukan hanya menghasilkan kemangkusan dan kesangkalan semata, melainkan juga mampu meningkatkan kualitas demokrasi itu sendiri, terutama penguatan lembaga-lembaga demokrasi.

Para elit politik yang terliterasikan dengan baik, tentu tidak akan berpikir untuk kepentingan diri dan golongannya saja, melainkan kepentingan negara dan bangsa secara keseluruhan. Ketika membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu mereka akan lebih banyak memikirkan bahwa undang-undang itu dibuat bukan untuk menguntungkan partai politiknya saja, melainkan untuk kepentingan semua partai politik, dan terutama untuk seluruh rakyat Indonesia.

Adanya kecenderungan pelanggaran oleh penyelenggara pemilu memperlihatkan dengan jelas bahwa mereka belum terliterasikan secara politik dengan baik (*politically literate*). Mungkin pada aspek kognitif mereka cukup bagus, dalam artian pengetahuan politik mereka tentang tata cara penyelenggaraan pilkada atau pemilu dan segala hal yang terkait dengannya cukup memadai, setidaknya jika dibandingkan dengan masyarakat secara umum. Namun belum tentu pada aspek sikap dan psikomotornya mereka terliterasikan dengan baik dan agaknya itulah yang kerap terjadi di kalangan mereka.

e. Pendekatan Literasi Politik

Praktik kandidasi yang kerap kali ditunjukkan dengan cara instan dan pragmatis mesti memperoleh perhatian dari berbagai pihak dan elemen. Salah satu cara untuk mengantisipasi hal itu dengan menerapkan pendekatan literasi politik. Literasi politik merupakan satu di antara simpul kekuatan pot warganegara. Demokrasi prosedural pada kenyataannya telah menghadirkan banyak residu bagi eksistensi dan kemandirian politik. Residu tersebut berupa desain institusional serta tipe kekuasaan eksekutif yang penuh paradoks, kontestasi pada

kekuasaan legislatif, kartelisasi dan praktik demokrasi kolusif serta rawannya distorsi politik media substansi kekuatan literasi politik ada pada partisipasi politik warga yang kritis dan memberdayakan terkait dengan konsep-konsep pokok politik yang akan berdampak pada kehidupan warga negara. Literasi politik bukanlah semata konsep normatif, melainkan bauran antara pengetahuan, skill, dan sikap politik (Gun Gun, 2011).

Mengamati berbagai paradoks dalam proses kandidasi, ada beberapa tawaran proses kandidasi dan tentu saja proses tersebut bagian dari tindakan literasi politik pada tataran pilkada serentak, antara lain: Pertama pendidikan politik. Partai politik memiliki peran yang penting dalam melakukan pendidikan politik. Fungsi pendidikan politik merupakan sebagai proses pembelajaran pemilih atau masyarakat hingga dalam politik kenegaraan. Fungsinya meliputi mulai dari pembelajaran mengenai hak politik warga hingga menjadi aktor dalam penentuan kebijakan. Proses kandidasi yang instan dan hanya mementingkan variabel popularitas dan elektabilitas saja merupakan sebuah proses yang tidak menjalankan fungsi pendidikan dan literasi politik sesuai dengan fungsi partai politik.

Kedua, kandidasi dilakukan secara transparan. Misalnya, partai politik harus menyelenggarakan konvensi secara terbuka agar bisa diikuti oleh seluruh kader partai politik yang potensial. Budaya konvensi ini merupakan sebuah upaya yang memberikan hak politik pada setiap kader partai politik dan untuk menyeleksi kandidat yang punya kapasitas, jejak, dan potensial.

Ketiga, melek politik. Selain keputusan para elit politik yang berperan dalam proses kandidasi, maka warga negara harus memiliki pemahaman literasi politik yang baik, agar mampu memahami, berpikir secara kritis dalam menyikapi proses kandidasi oleh partai politik secara rasional. Pemilih rasional pada umumnya lebih memprioritaskan berbagai variabel antara lain: pengalaman politik, rekam jejak, pengalaman birokrasi, integritas, *leadership*, visi dan misi seorang.

Oleh karena itu, pemahaman literasi politik menjadi sebuah rujukan negara dalam melakukan tindakan politik pada era demokrasi elektoral. Keempat, proses kandidasi oleh partai politik menggunakan model dialektis, bukan monologis. Partai politik memiliki peran dan otoritas untuk merubah kultur politik monologis, *top down*, dan satu arah dalam pencarian kandidat untuk diusung dalam pilkada serentak. Model dialektis ini juga memberikan peluang kepada seluruh kader partai politik untuk berkontribusi dalam proses kandidasi. Artinya model dialektis ini lebih berproses dan berjenjang bukan sistem penunjukkan oleh ketua umum partai politik. Oleh karena itu, model ini kiranya akan memperlakukan secara adil kepada seluruh kader partai untuk berkontribusi dalam jabatan-jabatan publik secara elegan.

Kelima, rekayasa politik. Rekayasa politik adalah sebuah ke dalam politik yang berkaitan dengan upaya untuk merancang lembaga lembaga politik dalam suatu masyarakat. Masyarakat berperhati (*attentive public*) yang peduli terhadap proses kandidasi bisa turut berkontribusi dalam pelatihan kaderisasi politik. Misalnya lembaga "Satu Nama". Lembaga ini adalah sebuah organisasi nirlaba yang bergerak di bidang pemberdayaan masyarakat melalui pendampingan advokasi, dan pelatihan. Salah satu kegiatan yang tengah dilakukan adalah serangkaian pelatihan pendidikan politik untuk masyarakat terutama kaum intelektual muda, aktivis, dan politisi. Oleh karena itu, tidak hanya partai politik saja yang bertanggungjawab dalam menguatkan dan meningkatkan literasi politik, akan tetapi organisasi masyarakat sipil (*Civil Society Organizations*) bisa berkontribusi dalam penguatan politik kewarganegaraan terutama advokasi untuk calon politisi masa depan bangsa ini.

f. Agenda Literasi Politik

Literasi politik merupakan bauran dari pemahaman, pengetahuan, sikap warga negara dalam merespon demokrasi secara substantif. Di tengah kondisi masyarakat yang masih banyak belum memiliki pendidikan

yang baik, maka kerap kali demokrasi dibajak oleh oknum politisi untuk memanipulasi melalui kekuatan rujukan dan politik uang. Peristiwa ini peneliti temukan di sebuah warung kopi yang terletak di pelosok Desa, emak-emak yang pada saat itu harusnya datang ke TPS untuk menyuarakan hak politiknya, malah ogah-ogahan karena tidak beri uang oleh para kontestan. Pemandangan seperti ini masih banyak ditemukan di berbagai lapisan masyarakat, baik perkotaan maupun pedesaan. Dengan kondisi dan situasi seperti itu, kerap kali terjadi kesepakatan saling menguntungkan antara pemilih dan calon anggota legislatif berupa imbalan finansial (politik uang). Dengan demikian, betapa pentingnya kemampuan literasi politik warga sebagai modal dasar untuk berpartisipasi pada pemilihan umum. Sikap dan pandangan warga akan berdampak pada perilaku masyarakat dalam merespons sistem demokrasi di suatu negara.

Menurut pendapat Bernard Crick (2000:61) dalam tulisannya *Essays on Citizenship*, definisi dasar tentang literasi politik adalah pemahaman praktis tentang konsep-konsep yang diambil dari kehidupan sehari-hari dan bahasa. Literasi politik merupakan upaya memahami seputar isu utama politik, apa keyakinan utama para kontestan, bagaimana kecenderungan mereka mempengaruhi diri anda dan saya. Singkatnya literasi politik merupakan senyawa dari pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Crick menegaskan literasi politik lebih luas dari hanya sekedar pengetahuan politik, melainkan cara membuat menjadi efektif dalam kehidupan politik dan dorongan untuk menjadi aktif, partisipatif dalam melaksanakan hak dan kewajiban, baik dalam keadaan resmi maupun area publik yang sifatnya suka rela (Bhakti, 2012).

Agenda literasi politik bisa diperankan oleh lembaga suprastruktur maupun lembaga infrastruktur politik. Terutama mereka yang masuk kategori masyarakat berperhatian (*attentive public*) yang mampu bersikap analitis, strategis, rasional, dan kritis dalam mengawal literasi politik ditengah pasar politik global yang kerap kali direduksi oleh berbagai kepentingan sesaat.

g. Tindakan Literasi Politik

Kini, sudah saatnya literasi politik fokus pada tindakan (*action*) Hal ini dilakukan dapat dilakukan melalui empat pendekatan. Pertama, warga didorong untuk memiliki kemampuan mendefinisikan kebutuhan terhadap informasi politik (*defining the need of political information*) Hal ini, misalnya terkait dengan cara merumuskan definisi operasional tentang informasi apa yang sebenarnya untuk mengetahui secara jelas para kandidat tersebut. Misalnya latar belakang pendidikan formal dan informal, riwayat karier, latar belakang keluarga, konstruksi berpikir, dan *track record* kepemimpinan. Saat dia mengkampanyekan diri ke publik, maka tak ada salahnya juga ada gerakan independen yang secara kritis mempublikasikan informasi jejak rekam seluruh kandidat sehingga publik memiliki pengayaan informasi yang sifatnya komparatif.

Kedua, menetapkan strategi pencarian (*initiating the search strategy*) Ini merupakan strategi investigasi terhadap seluruh proses politik Misalnya, dari mana sumber pendanaan kampanye, siapa saja tim suksesnya, apakah ada pelanggaran-pelanggaran prosedur kampanye dan lain-lain. Dengan banyaknya organisasi independen masyarakat atau perseorangan melakukan hal ini, maka pelanggaran seperti kasus aliran dana DKP dalam Pilpres 2004 sejak dini akan terdeteksi.

Ketiga, gerakan mengomunikasikan informasi (*communicating the information*). Hal ini sangat terkait dengan peran media dalam proses publikasi. Ada baiknya media menciptakan satu asosiasi yang kuat semacam jaringan pers untuk mengawasi sekaligus menjadi kekuatan di arus utama yang menjadi penyeimbang. Misalnya saja, kampanye yang diliput media dapat merekam segala janji yang diucapkan kandidat sehingga dapat mejadi informasi publik yang autentik.

Keempat, mengevaluasi produk dari proses akhir politik (*evaluating the political campaign process*). Hal ini terkait dengan evaluasi menyeluruh di setiap tingkatan kampanye pilkada. Masyarakat punya hak untuk

mengevaluasi dan merekomendasikan apakah seorang kandidat layak atau tidak.

Tentu pendekatan-pendekatan tersebut memerlukan kegiatan-kegiatan yang bisa diakses langsung oleh masyarakat. Diantara kegiatan literasi politik tersebut adalah:

- 1) Mendaftar dan menganalisis isu-isu kontemporer melalui teknik CFR (*Conclusion, Finding, Recommendation*)
- 2) Membuat *peer group* untuk sharing dan melakukan aksi bersama
- 3) Melakukan pendidikan politik untuk memperbesar *public Attentive*
- 4) Mempublikasikan tulisan yang fokus menganalisis dinamika politik
- 5) Membuat jejaring dengan kelompok suprastruktur politik (eksekutif-legislatif-yudikatif) dan infrastruktur politik (partai politik, *interest group, pressure group*, media komunikasi politik, dan figur politik)
- 6) Melakukan advokasi (litigasi dan non litigasi)
- 7) Menginisiasi respon opini publik terkait kebijakan publik
- 8) Mengintensifkan diskusi melalui ICT (*Information and Communication Technology*)

h. Membumikan Literasi Politik

Demikian beberapa kajian dan tawaran terkait dengan kegiatan literasi politik. Tentu, masih banyak hal yang bisa dimasukkan dalam menggagas dan membumikan cita-cita literasi politik ini. Ada beberapa hal yang bisa disimpulkan dari paparan di atas.

Pertama, kegiatan literasi politik merupakan hal yang sangat penting dalam penguatan dan pemberdayaan politik warga negara. dalam mengedukasi hak-hak politik warga negara sehingga memahami benar posisinya di antara berbagai kekuatan politik yang ada.

Kedua, kegiatan literasi politik kerap direduksi oleh berbagai faktor antara lain desain institusional serta tipe kekuasaan eksekutif, kontestasi pada kekuasaan legislatif, kartelisasi politik dan praktik demokrasi kolusif, serta menguatnya distorsi politik media.

Ketiga, literasi politik itu bukanlah sebatas wacana (*discourse*). Melainkan perpaduan antara pengetahuan yang memadai, keterampilan dalam pencarian dan komparasi informasi politik, sekaligus juga sikap politik mereka terkait dengan hak dan kewajibannya sebagai warga negara.

i. Indikator Literasi Politik

Literasi politik meniscayakan adanya elemen-elemen yang dapat diidentifikasi dan diukur. Dalam kaitan ini, Madhok (dalam Heryanto, 2021) menawarkan setidaknya empat indikator literasi politik yaitu:

- 1) Kehirauan dan kesadaran pentingnya aktivitas dan institusi politik, kewenangan, dan peranannya.
- 2) Kemampuan untuk membuat opini dan otonomi posisi dalam proses politik dalam rangka menghasilkan suatu *outcome* politik.
- 3) Pengetahuan mengenai kebijakan, perencanaan, dan anggaran pemerintah untuk pembangunan dan pelayanan publik.
- 4) Partisipasi dalam kegiatan politik.

2. Tinjauan Umum Budaya Politik Partisipan

a. Pengertian Budaya Politik

Setiap masyarakat dari suatu negara memiliki budaya politik, demikian individu-individu yang hidup ditengah-tengah masyarakat yang senantiasa memiliki orientasi terhadap sistem politiknya. Hal itu terjadi dalam masyarakat tradisional dan masyarakat modern, bahkan masyarakat primitif sekalipun. Secara umum dapat dikatakan bahwa dalam kaitan budaya politik, individu-individu dalam masyarakat itu menilai tempat dan peranannya di dalam sistem politik. Pengertian budaya politik seperti itu menggerakkan pemahaman pada perpaduan antara dua tingkat orientasi politik, yaitu sistem dan individu (Sudijono, 1995).

Budaya politik sebagai unsur dari kebudayaan merupakan sesuatu yang inheren pada setiap masyarakat dalam sistem politik tradisional maupun

modern. Dalam hal ini Almond dan Verba mendefinisikan budaya politik sebagai sikap individu terhadap sistem politik dan komponen-komponennya, dan juga sikap individu terhadap peranan yang dapat dimainkan dalam sebuah sistem politik. Selanjutnya Almond dan Verba melihat bahwa dalam pandangan objek politik terdapat tiga orientasi, yakni pertama, orientasi kognitif yaitu orientasi yang menyangkut pengetahuan tentang politik dan kepercayaan pada politik, peranan dan segala kewajibannya. Kedua, orientasi afektif yaitu perasaan terhadap sistem politik, peranannya, para aktor, dan segala penampilannya. Ketiga, orientasi evaluatif yaitu keputusan dan praduga tentang objek-objek politik yang secara tipikal melibatkan kombinasi standar nilai dan kriteria dengan informasi dan perasaan (Gatara dan Said, 2011).

Contoh tentang saling berhubungannya ketiga orientasi tersebut. Untuk dapat membentuk suatu penilaian tentang seorang pemimpin, seorang warga negara dituntut untuk memiliki pengetahuan tentang pemimpin tersebut secara memadai. Namun demikian, tentulah bahwa pengetahuan tersebut telah dipengaruhi oleh berbagai aspek dan yang paling dominan ialah perasaannya sendiri. Demikian pula sebaliknya bahwa pengetahuan seseorang tentu juga dipengaruhi oleh pengetahuan tentang simbol politik yang sedang berlangsung. Bahkan dikatakan bahwa pengetahuan tentang simbol saling mempengaruhi perasaan seseorang terhadap sistem politik secara keseluruhan (Syamsudin, 2009).

Selanjutnya dapat dinyatakan bahwa budaya politik suatu masyarakat dengan sendirinya berkembang didalam dan dipengaruhi oleh kompleks nilai yang ada dalam masyarakat tersebut. Dapat dikatakan bahwa kehidupan masyarakat dipenuhi oleh interaksi antar orientasi dan antar nilai. Dengan kondisi dapat dikatakan bahwa dalam kerangka pengembangan budaya politik suatu bangsa, diperlukan keterjalinan dan keterkaitan antar nilai budaya maupun antar komponen orientasi dalam masyarakat sehingga dapat terjalin proses interaksi ke arah pengembangan budaya (Syamsudin, 2009).

Budaya politik merupakan aspek yang sangat signifikan dalam sistem politik. Hal ini dikarenakan bekerjanya struktur dan fungsi politik sangat ditentukan oleh budaya politik yang melingkupinya. Dalam konteks sistem politik Indonesia, memposisikan budaya politik sebagai satu dari sekian jenis lingkungan yang mengelilingi, mempengaruhi, dan menekan sistem politik, bahkan yang dianggap paling intens dan mendasari sistem politik. Lebih jauh, mengkonstatasi bahwa salah satu parameter pembangunan politik Indonesia adalah tercapainya keseimbangan atau harmoni budaya politik dengan pelembagaan politik yang ada atau akan ada (Herimanto, 2010).

Berpijak dari paparan di atas, secara eksplisit menerangkan bahwa budaya politik sesungguhnya akan dapat menjelaskan perilaku politik dan partisipasi politik, dengan kata lain pendekatan budaya politik adalah upaya menembus cara lebih dalam pemahaman tentang perilaku politik dan partisipasi politik. Selain itu, pendekatan budaya politik untuk mengenal atribut atau ciri yang terpokok untuk menguji proses yang berlanjut maupun yang berubah, seiring dengan proses perubahan dan perkembangan politik masyarakat di masa konsolidasi demokrasi saat ini.

Untuk melihat peranan individu-individu dalam subjek politik itu, Almond dan Verba membedakan golongan subjek. Subjek pertama adalah peranan struktur khusus seperti badan legislatif, eksekutif atau birokrasi. Kedua penunjang jabatan seperti pemimpin monarki, legislator, dan administrator. Struktur dan penunjang jabatan serta struktur secara timbal balik dapat diklasifikasi apakah mereka termasuk dalam proses “masuk” politik atau dalam proses administratif atau “keluaran”. Dengan proses (input) politik dapat terjadi bahwa arus tuntutan politik masyarakat mengalami pemutusan dengan proses konversi tuntutan-tuntutan ini ke arah kebijakan dan otoritatif. Berdasarkan sikap, nilai-nilai, informasi dan kecakapan politik yang dimiliki. Orientasi warga negara terhadap kehidupan politik dan pemerintah negaranya dapat digolongkan ke dalam kebudayaan

politiknya. Suatu model budaya politik tertentu tidak dapat dihubungkan secara kaku dengan sistem politik, apalagi hal itu menyangkut budaya politik yang lingkungannya luas, terutama bila subkultur juga disertakan.

Dari uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa budaya politik merupakan pola perilaku suatu masyarakat dalam kehidupan bernegara, penyelenggaraan administrasi negara, politik pemerintahan, hukum, norma kebiasaan yang dihayati oleh seluruh anggota masyarakat setiap harinya.

b. Tipologi dan Budaya Politik

Almond dan verba (1985) mengklasifikasikan tipe-tipe budaya politik yaitu:

1) Budaya Politik Parokial

Budaya politik parokial biasanya terdapat dalam sistem politik tradisional dan sederhana, dengan ciri khas spesialisasi masih sangat kecil, sehingga pelaku-pelaku politik belum memiliki pengkhususan tugas tetapi peranan yang satu dilakukan bersamaan dengan peranan yang lain seperti aktivitas dan peranan pelaku politik dilakukan bersamaan dengan perannya baik dalam bidang ekonomi, sosial maupun keagamaan.

Collemen mencontohkan masyarakat suku-suku di Afrika, yang tidak terdapat pembagian pesan secara khusus antara pesan politik, sosial ataupun religius. Orientasi parokial menyatakan ketiadaannya harapan-harapan terhadap perubahan yang diperbandingkan dengan sistem politik lainnya (Sudijono, 1995). Dengan kata lain bahwa masyarakat dengan budaya parokial tidak mengharapkan apapun dari sistem politik termasuk bagian-bagian terhadap perubahan sekalipun. Dengan demikian parokialisme dalam sistem politik yang diterensiasi lebih bersifat afektif dan orientatif daripada kognitif.

Dapat disimpulkan bahwa budaya politik parokial adalah budaya politik yang tingkat partisipasi politiknya sangat rendah.

2) Budaya Politik Subjek

Tipe budaya politik subjek ini memiliki frekuensi yang tinggi terhadap sistem politiknya, yang perhatian dan frekuensi orientasi terhadap aspek masukan dan partisipasinya dalam aspek keluaran sangat rendah. Hal itu berarti bahwa masyarakat dengan tipe budaya subjek menyadari telah adanya otoritas pemerintah. Orientasi pemerintah yang nyata terlihat dari kebanggaan ungkapan saling, baik mendukung atau bermusuhan terhadap sistem (Sudijono, 1995). Namun demikian, posisinya sebagai subjek (kaula) mereka pandang sebagai posisi yang pasif. Di yakini bahwa posisinya tidak akan menentukan apa-apa terhadap perubahan politik. Mereka beranggapan bahwa dirinya adalah subjek yang tidak berdaya untuk mempengaruhi ataupun mengubah sistem. Dengan demikian secara umum mereka menerima keputusan yang diambil dan segala kebijaksanaan pejabat yang berwenang dalam masyarakat. Bahkan mereka memiliki keyakinan bahwa apapun keputusan pejabat bersifat mutlak. Tidak dapat diubah-ubah, dikoreksi, apalagi ditentang. Bagi mereka yang prinsip adalah mematuhi perintahnya, menerima, loyal, dan setia terhadap anjuran, perintah, serta kebijaksanaan pemimpinnya.

Orientasi budaya subjek yang murni sering terwujud dalam masyarakat yang tidak terdapat struktur masukan yang dideferensiasi. Demikian pula dalam budaya subjek orientasi dalam sistem politik lebih normatif dan efektif daripada kognitif, oleh karena itu, dapat dipahami bila mereka memiliki sikap yang demikian.

Dari uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa budaya politik subyek adalah budaya politik masyarakat yang bersangkutan sudah relatif maju baik sosial maupun ekonominya tetapi masih bersifat pasif.

3) Budaya Politik Partisipan

Masyarakat dengan budaya partisipan, memiliki orientasi politik yang secara eksplisit ditujukan kepada sistem secara keseluruhan, bahwa terhadap struktur, proses politik dan administratif, tegasnya terhadap input maupun output dari sistem politik itu. Dalam budaya itu seseorang atau orang lain dianggap sebagai anggota aktif dalam kehidupan politik, memiliki kesadaran terhadap hak serta tanggung jawabnya. Masyarakat juga merealisasi dan mempergunakan hak-hak politiknya (Sudijono, 1995).

Dengan demikian, masyarakat dalam budaya politik partisipan tidaklah menerima begitu saja keputusan politik. Hal itu karena masyarakat telah sadar bahwa begitu kecilnya mereka dalam sistem politik, meskipun tetap memiliki kesadaran sebagai totalitas, masukan, keluaran dalam konstelasi sistem politik yang ada.

Anggota-anggota masyarakat partisipatif diarahkan pada peranan pribadi sebagai aktivis masyarakat, meskipun sebenarnya dimungkinkan mereka menolak ataupun menerima.

Masyarakat dalam budaya politik partisipan memahami bahwa mereka berstatus warga negara dan memberikan perhatian terhadap sistem politik. Masyarakat memiliki kebangsaan dan kemauan untuk berperan dalam sistem politik. Selain itu, masyarakat dalam budaya politik ini memiliki keyakinan dapat mempengaruhi pengambilan kebijakan publik dan membentuk kelompok untuk melakukan protes jika pelaksanaan pemerintah tidak transparan. Dalam budaya politik partisipan ini, demokrasi dapat berkembang dengan baik. Hal ini dikarenakan terjadinya hubungan yang harmonis antara warga negara dan pemerintah yang ditunjuk oleh tingkat kompetensi politik (penyelesaian sesuatu secara politik), dan tingkat *efficacy* (keberdayaan). Dapat dikatakan bahwa tipe budaya ini merupakan kondisi ideal bagi masyarakat secara politik. Dalam budaya politik partisipan, orientasi politik warga terhadap keseluruhan objek, baik

umum, input, maupun output secara pribadinya mendekati satu atau dapat dikatakan tinggi.

Beberapa karakter publik dan privat sebagai perwujudan budaya politik partisipan sebagai berikut:

- a) Menjadi anggota masyarakat yang independen. Karakter ini meliputi kesadaran pribadi untuk bertanggungjawab sesuai ketentuan, bukan karena keterpaksaan atau pengawasan dari luar; bertanggungjawab atas tindakan yang di perbuat; memenuhi kewajiban moral dan hukum sebagai anggota masyarakat demokratis.
- b) Memenuhi tanggung jawab personal kewargaan dibidang ekonomi dan politik. Tanggungjawab ini antara lain meliputi memelihara atau menjaga diri; memberi nafkah dan merawat keluarga; mengasuh dan mendidik anak. Didalamnya termasuk pula mengikuti informasi tentang isu-isu publik, seperti menentukan pilihan (voting); membayar pajak; melayani masyarakat; melakukan tugas kepemimpinan sesuai bakat masing-masing.
- c) Menghormati harkat dan martabat kemanusiaan tiap individu. Menghormati orang lain berarti mendengarkan pendapat mereka, bersifat sopan, menghargai hak-hak dan kepentingan-kepentingan sesama warga negara, mengikuti aturan “prinsip mayoritas” namun tetap menghargai hak-hak minoritas untuk berbeda pendapat.
- d) Berpartisipasi dalam uruan-urusan kewarganegaraan secara efektif dan bijaksana. Karakter ini merupakan standar informasi sebelum menentukan pilihan (voting) atau berpartisipasi dalam debat publik; terlibat dalam diskusi yang santun dan serius; memegang kendali dalam kepemimpinan bila di perlukan; membuat evaluasi tentang kapan saatnya kepentingan pribadi seseorang sebagai warga negara harus di kesampingkan demi memenuhi kepentingan publik; mengevaluasi kapan seseorang karena kewajiban atau

prinsip-prinsip konstitusional di haruskan menolak tuntutan-tuntutan kewarganegaraan tertentu.

- e) Mengembangkan fungsi demokrasi konstitusional secara sehat. Karakter ini meliputi: sadar informasi dan kepekaan terhadap unsur-unsur publik; melakukan penelaahan terhadap nilai-nilai dan prinsip-prinsip konstitusional; memonitor keputusan para pemimpin politik dan lembaga-lembaga publik agar sesuai dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip tadi; mengambil langkah-langkah yang di perlukan bila ada kekurangannya. Karakter ini mengarahkan warga negara agar bekerja dengan cara-cara yang damai dan legal dalam rangka mengubah undang-undang yang dianggap tidak adil dan tidak bijaksana.

Dari uraian diatas, maka didapatkan sebuah kesimpulan bahwa budaya politik partisipan yaitu budaya politik yang ditandai dengan kesadaran politik yang sangat tinggi. Masyarakat mampu memberikan opininya dan aktif dalam kegiatan politik.

Namun dalam suatu masyarakat kerap kali ditemukan inklanasi kepada salah satu tipe budaya politik, misalnya, dalam budaya politik partisipan masih dapat dijumpai individu-individu yang tidak menaruh minat pada obyek-obyek politik secara luas. Menyadari realitas budaya politik yang hidup dimasyarakat tersebut, Almond (1956) menyimpulkan adanya budaya politik campuran (*mixed political culture*) yang menurutnya lazim terjadi pada suatu masyarakat yang senantiasa mengalami perkembangan dan dinamika yang pesat, sehingga sistem politik bisa berubah dan kultur serta struktur politik senantiasa tidak selaras. Budaya politik campuran yang dikemukakan Almond sebagai berikut:

a). Budaya Parokial-Subjek

Tipe budaya politik saat sebagian besar penduduk menolak tuntutan-tuntutan eksklusif masyarakat suku yang feodalistik. Masyarakatnya mengembangkan kesetiaan terhadap sistem

politik yang lebih kompleks dengan struktur-struktur pemerintahan pusat yang sentralistis dan bersifat kompleks. Apabila kebudayaan warga negara merupakan sebuah kebudayaan politik campuran seperti itu, didalamnya terdapat banyak individu yang aktif dalam politik. Tetapi banyak pula yang mengambil peranan subyek yang lebih aktif. Peranan peserta, dengan demikian telah ditentukan kedalam peranan parokial subjek. Hal itu berarti bahwa warga negara yang aktif melestarikan ikatan-ikatan tradisional dan non politik, dan peranan politiknya yang lebih penting sebagai seorang subjek. Oleh karena itu, dapat ditegaskan bahwa orientasi peserta menggeser orientasi parokial dan subjek, tetapi tanpa menyebutkan kedua peranan terakhir itu secara eksplisit (Sudijono, 1995).

Dari uraian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa budaya parokial-subjek adalah budaya politik yang masyarakat yang bersangkutan sudah relatif maju baik sosial maupun ekonominya tetapi masih bersifat pasif.

b). Budaya Subjek-Partisipan

Dalam budaya subjek-partisipan ini, sebagian besar penduduk telah memperoleh orientasi-orientasi input yang bersifat khusus dan serangkaian orientasi pribadi yang aktif. Sementara sebagian penduduk masih terorientasi dengan struktur kekuasaan yang otoriter dan menempatkan partisipasi masyarakat pasif. Dengan demikian, terjadi perbedaan orientasi pada masyarakat, sebagian yang cenderung mendorong proses partisipasi aktif warga negara, sebagian lain justru sebaliknya yakni pasif (Sudijono, 1995).

Dari uraian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa budaya subjek-partisipan adalah sebuah proses peralihan dari budaya

subjek menuju budaya partisipan yang sangat dipengaruhi oleh cara bagaimana peralihan budaya parokial menuju budaya subjek.

c). Budaya Parokial-Partisipan

Kondisi budaya ini biasanya terjadi di dalam negara yang sedang berkembang hampir seluruh negara berkembang memiliki budaya parokial. Karenanya sistem politik mereka terancam oleh fragmentasi parokial yang tradisional, padahal mereka ingin secepatnya menjadi sebuah negara modern. Suatu masa, cenderung ke otoritarianisme dan pada waktu yang lain ke arah demokrasi. Struktur untuk bersandar tidak terdapat, sementara itu birokrasi tidak dapat berdiri atas kepentingan masyarakat, bahkan infrastrukturnya tidak berakar pada warga negara yang kompeten dan bertanggung jawab (Sudijono, 1995).

Dari uraian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa budaya parokial-partisipan yaitu sebuah budaya yang masih terpengaruh pada budaya parokial yang tradisional yang padahal ingin menjadi sebuah negara yang lebih modern.

d). Budaya Parokial-Subjek-Partisipan

Civic culture (budaya kewarganegaraan) menekankan pada partisipasi rasional dalam kehidupan politik, digabungkan dengan adanya kecenderungan politik parokial dan subjek warga negara maka menjadikan sikap-sikap tradisional dari penggabungannya dalam orientasi partisipan yang mengarah pada suatu budaya politik dengan keseimbangan aktivitas politik, keterlibatan dan adanya rasionalitas serta kepasifan, tradisionalitas, dan komitmen terhadap nilai-nilai parokial. Singkatnya, budaya politik ini merupakan penggabungan karakteristik dari ketiga budaya politik murni (Sudijono, 1995). Dalam pemahaman yang lebih sederhana, budaya politik kewarganegaraan merupakan

kombinasi antara karakteristik-karakteristik aktif, rasional, mempunyai informasi yang cukup mengenai politik, kesetiaan pada sistem politik, kepercayaan dan kepatuhan terhadap pemerintah, keterkaitan pada keluarga, suku, dan agama.

Dari uraian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa budaya parokial-subjek-partisipan merupakan sebuah penggabungan karakteristik dari ketiga budaya politik murni.

c. Transformasi Budaya Politik

Almond dan Verba mengemukakan perlunya "teori sosialisasi politik" dalam penyampaian pesan budaya politik. Pada bukunya, dijelaskan bahwa ada tiga anggapan yang biasa dibuat untuk subjek berhubungan dengan sosialisasi politik sebagai proses yang sederhana.

- 1) Pengalaman sosialisasi yang akan mempengaruhi tingkah laku politik dihari yang terjadi sebelumnya dalam kehidupan.
- 2) Pengalaman ini bukan pengalaman yang bersifat politik, tetapi memiliki berbagai konsekuensi politik laten, yaitu yang tidak dimaksudkan melahirkan dampak politik, sedang dampak tersebut tidak terorganisasi.
- 3) Proses sosialisasi selalu bersifat unidireksional: yaitu pengalaman-pengalaman mendasar di dalam keluarga mempunyai pengaruh penting terhadap struktural sekunder politik, tetapi sebaliknya tidak dipengaruhi oleh politik.

Adapun sarana alamiah untuk terjadinya sosialisasi politik adalah keluarga, sekolah, dan tempat bekerja. Institusi tersebut, menurut teori ini, membutuhkan proses ekspansi, yang bisa dilakukan, baik secara eksplisit maupun implisit. Orang tua atau guru dapat secara eksplisit berusaha mengajarkan norma tingkah laku politik. Pengaruh latihan warga negara eksplisit ini akan dipertimbangkan pula.

d. Budaya Politik di Indonesia

Dalam konteks ke-Indonesiaan, budaya politik secara tak langsung merupakan realitas yang paling dianggap intens dan mendasari sistem politik Indonesia. Pengamatan terhadapnya menurut Rusadi, tidaklah berhenti pada hasil perolehan identifikasi pengamatan momen (*moment opname*) tentang pola dan struktur kebudayaan dalam situasi tertentu dan terbatas.

Sistem politik yang dipengaruhi atau dilandasi kebudayaan (politik), baru dapat dimengerti dan dipahami dengan baik setelah mengarungi kurun waktu tertentu (yang mungkin cukup panjang). Budaya politik dan struktur politik tidak pernah berada dalam keadaan diam (stasioner), tetapi selalu bergerak dan berinteraksi satu sama lain.

Dengan demikian, pembangunan politik Indonesia dapat pula diukur berdasarkan keseimbangan atau harmoni yang dicapai antara lain oleh budaya politik dengan pelembagaan politik yang ada atau akan ada.

Konstataasi sementara tentang budaya politik Indonesia, yang tentunya harus ditelaah dan dibuktikan lebih lanjut, adalah pengamatan tentang variabel sebagai berikut:

- 1) Konfigurasi subkultur di Indonesia masih beragam, walaupun tidak sekompleks yang dihadapi India misalnya, yang menghadapi masalah perbedaan bahasa, agama, kelas, kasta, yang semuanya relatif masih rawan (*vulnerable*).
- 2) Budaya politik Indonesia yang bersifat parokial satu dan budaya politik partisipan di pihak lain; dari satu segi, massa masih ketinggalan dalam menggunakan hak dan dalam memikul tanggung jawab politik yang mungkin disebabkan oleh isolasi dari kebudayaan luar, pengaruh penjajahan, feodalisme, bapakisme, ikatan primodial. Adapun di pihak lain, kaum elitnya sungguh-sungguh merupakan partisipan yang aktif disebabkan pengaruh pendidikan modern (Barat), kadang-kadang bersifat sekuler, dalam arti relatif dapat membedakan faktor-faktor penyebab disintegrasi seperti: agama, kesukuan, dan lain-lain.

Melihat segi ini, keadaan ini merupakan kondisi yang mencerahkan (*promising*), karena ternyata ide masih berperan besar sebagai salah satu modal bagi pembangunan. Jadi jelas terlihat, menurut Rusadi bahwa kebudayaan politik Indonesia merupakan “*mised political culture*” yang diwarnai besarnya pengaruh kebudayaan politik parokial-kaula.

- 3) Sifat ikatan primordial yang masih kuat berakar, yang dikenal melalui indikatornya berupa sentimen kedaerahan, kesukuan, keagamaan, perbedaan pendekatan terhadap keagamaan tertentu: puratisme dan nonpuratisme.
- 4) Kecenderungan budaya politik Indonesia yang masih mengukuhkan sikap paternalisme dan sifat patrimonial; sebagai indikatornya dapat disebutkan bapakisme, sikap asal bapak senang.
- 5) Dilema interaksi tentang introduksi modernisasi (dengan segala konsekuensinya) dengan pola-pola yang telah lama berakar sebagai tradisi dalam masyarakat.

Akhirnya, dari catatan konteks Indonesia, budaya politik Indonesia masih akan terus menarik untuk dikaji dan dipelajari karena dari setiap periode politik (pengurunannya), budaya politik relatif konstan, sedangkan sistem politik di Indonesia sering mengalami perubahan, pergeseran, dan pergantian sesuai dengan karakter rezim yang berkuasa, baik pada masa Orde Lama, Orde Baru maupun pada Orde Reformasi. Dari sini pula, sebenarnya kita memperoleh persoalan, meskipun dapat dikatakan bukan persoalan baru, tentang belum selesainya pembahasan mengenai bagaimana sesungguhnya keterkaitan antara budaya politik dan sistem politik di berbagai realitas politik. Untuk itu, kita perlu memperluas analisis wacana tersebut pada kesempatan lain yang lebih luas, dengan senantiasa mengacu pada adanya kesesuaian antara *das sollen* dan *das sein*.

e. Bentuk-Bentuk Budaya Politik Partisipan

Sebagai komunitas warga negara, hendaknya memiliki peran besar (partisipasi aktif) untuk melakukan perubahan politik yang lebih baik dan berbudaya. Melalui sarana pemilihan umum, kita dapat menjadikannya sebagai momentum untuk mendorong perubahan sosial politik, politik ekonomi, budaya, dan lain-lain kearah yang lebih baik dan demokratis melalui pemerintahan yang dipilih melalui pemilu, secara damai dan beradab (berbudaya). Semua itu dimaksudkan sebagai upaya melakukan pendidikan budaya politik partisipan (rakyat) yang lebih luas karena dengan demikian akan dapat digunakan sebagai salah satu rujukan untuk menentukan pilihan dalam pemilu secara arif, bijaksana, kritis, dan rasional. Dalam setiap tahapan pemilu, kita sebagai simpatisan (kader) partai politik, ataupun kaum terpelajar tidak ada larangan untuk mengikutinya. Namun demikian, hal yang perlu dikedepankan dalam kampanye adalah situasi damai karena dalam kampanye sering kali terjadi persinggungan antar massa pendukung dari partai politik (simpatisan dan kader) partai politik. Bermula dari saling mengejek dan saling hina di antara mereka ketika berpapasan di jalan raya dalam situasi kampanye, perkelahian antar massa pendukung partai politik seringkali terjadi. Untuk mewujudkan situasi seperti itu dibutuhkan toleransi yang besar terhadap kelompok yang berbeda pandangan politik dan juga sikap anti kekerasan Masyarakat yang ingin aktif dalam kampanye harus sadar bahwa tindakan brutal, kekerasan, dan keseluruhan hanya akan merusak situasi pemilu yang demokratis dan beradab. Untuk itu kita harus sadar bahwa brutalisme, kekerasan, dan kerusuhan yang mengiringi proses pemilu sebenarnya adalah tindakan yang sangat bertentangan dengan nilai-nilai demokratis dan budaya politik bangsa Indonesia

Suatu pemerintahan dengan budaya politik yang bertentangan dengan semangat pembangunan politik bangsa yang transparan (terbuka) apabila dalam penyelenggaraan sistem politik pemerintahannya tidak terdapat kebebasan aliran informasi dalam berbagai proses

kelembagaan sehingga tidak mudah diakses oleh masyarakat sebagai warga bangsa yang membutuhkan. Budaya politik feodalisme yang terjadi merupakan sebuah sistem pemerintahan dimana seorang pemimpin bangsawan memiliki anak buah banyak yang juga masih dari kalangan bangsawan, tetapi lebih rendah mereka biasa disebut vazal. Dalam penggunaan bahasa sekalipun, Warga menyadari akan hak dan tanggung jawabnya seringkali digunakan untuk menunjuk para perilaku-perilaku negatif yang mirip dengan perilaku para penguasa yang zalim, seperti kolot dan selalu ingin dihormati atau bertahan pada nilai-nilai lama yang sudah banyak ditinggalkan artinya sudah banyak tidak sesuai lagi dengan pengertian politik yang sesungguhnya. Realitas budaya politik masih menjadi kendala bagi proses pendidikan politik karena masih diwarnai oleh kuatnya pengaruh nilai-nilai feodalisme, primordialisme, dan paternalisme berlebihan dalam kehidupan sosial kemasyarakatan. Kondisi itu diperparah dengan semakin sulitnya mencari figur-figur yang dapat diteladani dalam kepemimpinan nasional. Keadaan ini dirasakan mempersulit mahasiswa dan kaum terpelajar dalam mengoperasionalkan konsep dan nilai-nilai yang terkandung dalam khazanah budaya bangsa.

Dari sudut pandang lain, bentuk budaya partisipan mahasiswa meliputi tingkat pengetahuan umum mahasiswa mengenai sistem politik negaranya, pemahaman mahasiswa mengenai struktur dan peran pemerintah dalam membuat kebijakan, pemahaman mengenai penguatan kebijakan yang meliputi masukan opini dari mahasiswa dan media massa kepada pemerintah, sejauh mana partisipasi mahasiswa dalam berpolitik dan bernegara serta sejauh mana pemahamannya mengenai hak dan kewajiban sebagai warga negara.

f. Indikator Budaya Politik Partisipan

Menurut Almond dan Verba (dalam Novianasari, 2016), budaya politik partisipan merupakan budaya politik yang demokratis. Dalam hal ini, akan mendukung terbentuknya sebuah sistem politik yang demokratis

dan stabil. Adapun indikator budaya politik partisipan yang dikemukakan oleh Almond dan Verba yaitu:

- 1) Tingkat pengetahuan umum mahasiswa mengenai sistem politik negaranya.
- 2) Pemahaman mahasiswa mengenai struktur dan peran pemerintah dalam membuat kebijakan.
- 3) Pemahaman mengenai penguatan kebijakan yang meliputi masukan opini dari mahasiswa dan media massa kepada pemerintah.
- 4) Sejauh mana partisipasi mahasiswa dalam berpolitik dan bernegara, serta sejauh mana pemahamannya mengenai hak dan kewajiban sebagai warga negara.

B. Kajian Penelitian Relevan

1. Penelitian ini dilakukan dilakukan oleh Huzaifa Katarudin dan Nora Eka Putri pada tahun 2020 dengan judul penelitian “Pengaruh Literasi Politik Terhadap Partisipasi Politik Pemilih Pemula Pada Pemilukada Kota Pariaman Tahun 2018”. Metode penelitian yang digunakan yaitu survey dengan subyek penelitian adalah kalangan pelajar tingkat SMA/Sederajat dan mahasiswa di sekisaran umur 17 hingga 21 tahun. Hasil penelitian ini adalah untuk mengetahui adanya pengaruh literasi politik tentang Pilkada terhadap partisipasinya dalam menggunakan hak pilih pada pemilu kada Kota Pariaman tahun 2018.

Perbedaan antara penelitian diatas dengan penelitian yang akan diteliti oleh peneliti terdapat pada variabel penelitian yaitu penelitian ini tidak meneliti variabel meningkatkan budaya politik. Namun, penelitian tersebut relevan karena memiliki kesamaan dalam ruang lingkup subyek dan obyek penelitian yaitu Pengaruh Literasi Politik.

2. Penelitian ini dilakukan dilakukan oleh Thomas Tokan Pureklolon pada tahun 2021 dengan judul penelitian “Eksistensi Budaya Politik di Indonesia : Sebuah Kajian”. Metode penelitian yang digunakan yaitu studi literatur dengan cara riset kepustakaan dengan subyek penelitian adalah masyarakat/warga negara Indonesia. Hasil penelitian ini adalah untuk

mendeskripsikan eksistensi budaya politik di Indonesia sesuai dengan konteks, situasi dan tujuan pembangunan politik di Indonesia.

Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang akan diteliti adalah pada ruang lingkup subyeknya yaitu masyarakat Indonesia terhadap budaya politik. Kemudian, persamaan dalam penelitian tersebut yakni meneliti mengenai budaya politik.

3. Penelitian ini dilakukan dilakukan oleh T.A.M. Ronny Gosal pada tahun 2014 dengan judul penelitian “Budaya Politik di Indonesia: Suatu Telaah Tentang Perkembangan Budaya Politik Partisipan Sejak Kemerdekaan Sampai Dengan Era Reformasi”. Metode penelitian yang digunakan yaitu studi literatur dengan cara riset kepustakaan dengan subyek penelitian adalah masyarakat/warga negara Indonesia. Hasil penelitian ini adalah untuk menelaah kembali budaya politik pada tatanan demokrasi yang berkembang di Indonesia. Budaya politik yang ada di kalangan elit sampai dengan masyarakat biasa terkadang saling bersinggungan, sehingga membangun kelompok-kelompok inklusif tertentu yang menyebabkan terjadinya gesekan-gesekan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang akan diteliti adalah pada ruang lingkup subyeknya yaitu masyarakat Indonesia terhadap budaya politik partisipan. Kemudian, persamaan dalam penelitian tersebut yakni meneliti mengenai budaya politik partisipan.

C. Kerangka Pikir

Penelitian ini nantinya akan mencari tahu bagaimana pengaruh literasi politik terhadap budaya politik partisipan mahasiswa PPKn FKIP Universitas Lampung. Berdasarkan identifikasi masalah yang telah dijelaskan sebelumnya bahwasannya sejumlah survey menunjukkan generasi milenial dan generasi Z diprediksi menjadi kelompok pemilih dengan proporsi terbesar di pemilu 2024. Pada pemilu serentak 2024 diprediksi jumlah pemilih muda akan mengalami peningkatan. Jika berkaca pada pemilu serentak 2019, data dari KPU jumlah pemilih muda sudah mencapai 70 juta-80 juta jiwa dari 193 juta pemilih. Ini artinya 35%-40% pemilih muda sudah

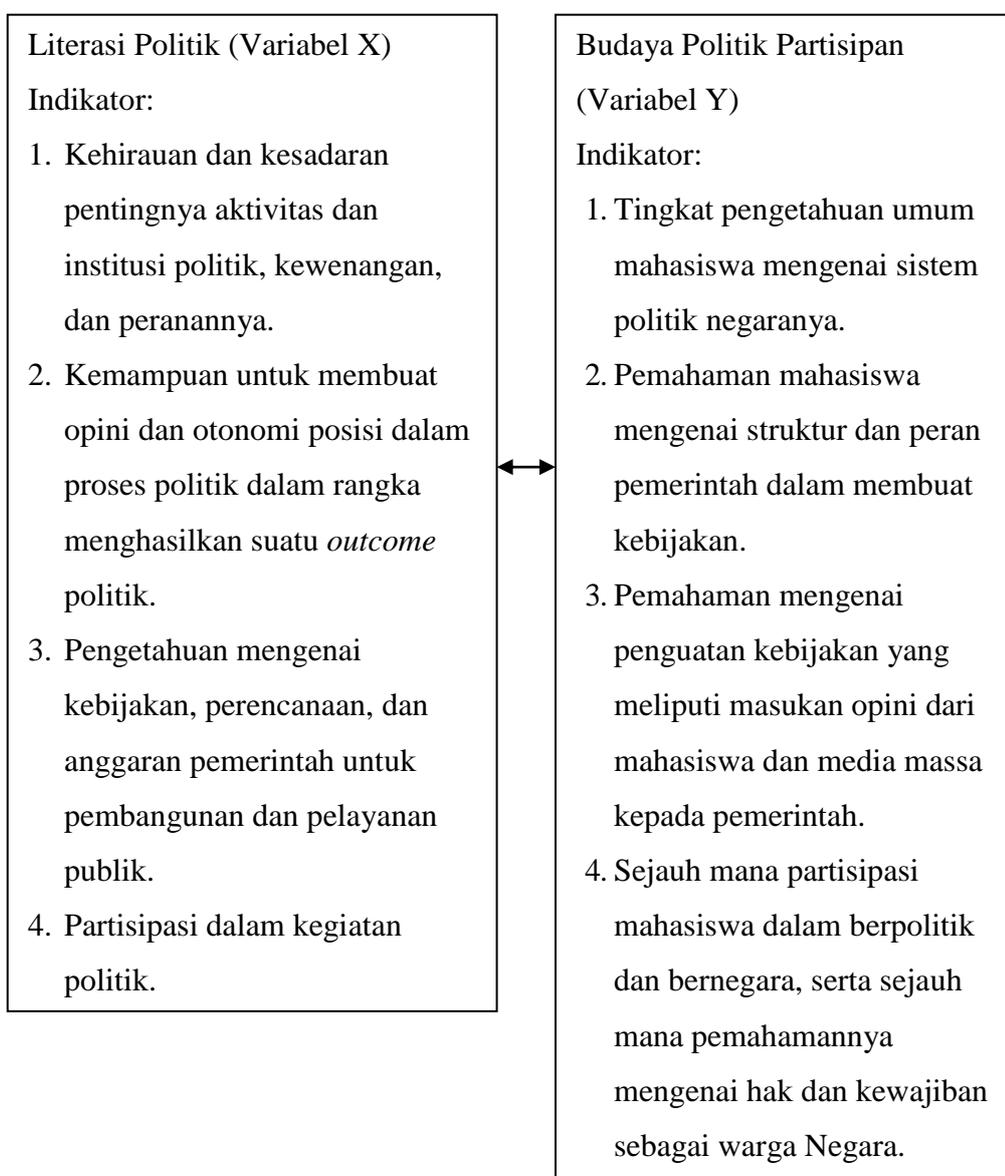
mempunyai kekuatan dan memiliki pengaruh besar terhadap hasil pemilu yang nantinya berpengaruh kepada kemajuan bangsa. Tapi persoalan lain yang bisa terjadi pada keikutsertaan para pemilih muda dalam pesta demokrasi itu, mereka juga bisa berpeluang menjadi penyumbang “golput” dalam pemilu 2024.

Kurangnya kesadaran berpolitik atau rendahnya pendidikan politik bagi para pemilih pemula dikhawatirkan akan menurunkan tingkat partisipasi politik pada pemilukada mendatang. Budaya politik adalah persepsi warga negara yang diaktualisasikan dalam pola sikap terhadap masalah politik dan peristiwa politik yang terjadi. Politik mencakup berbagai aspek dalam kehidupan bermasyarakat, seperti keagamaan, kegiatan ekonomi, bisnis, hubungan internasional, serta hubungan sosial masyarakat. Konsep ini dapat pula berarti berbagai aspek kegiatan masyarakat mempengaruhi kebijakan politik. Masyarakat dalam budaya politik partisipan memahami bahwa mereka berstatus warga negara dan memberikan perhatian terhadap sistem politik. Masyarakat memiliki kebangsaan dan kemauan untuk berperan dalam sistem politik. Selain itu, masyarakat dalam budaya politik ini memiliki keyakinan dapat mempengaruhi pengambilan kebijakan publik dan membentuk kelompok untuk melakukan protes jika pelaksanaan pemerintah tidak transparan. Maka dari itu, budaya politik partisipan dapat mempengaruhi kehidupan politik di Indonesia. Oleh karena itu, peneliti ingin mengetahui pengaruh literasi politik terhadap budaya politik partisipan mahasiswa PPKn FKIP Universitas Lampung.

Indikator yang digunakan dalam literasi politik (Variabel X) menurut pendapat Madhok yang dikutip dari tulisan Gun Gun Heryanto (2021), yaitu kehirauan dan kesadaran pentingnya aktivitas dan institusi politik, kewenangan, dan peranannya. Kedua, Kemampuan untuk membuat opini dan otonomi posisi dalam proses politik dalam rangka menghasilkan suatu *outcome* politik. Ketiga, Pengetahuan mengenai kebijakan, perencanaan, dan anggaran pemerintah untuk pembangunan dan pelayanan publik. Keempat, yaitu Partisipasi dalam kegiatan politik. Kemudian indikator dari budaya politik (Variabel Y) menurut Almond dan Verba (dalam Novianasari, 2016)

yaitu tingkat pengetahuan umum mahasiswa mengenai sistem politik negaranya, pemahaman mahasiswa mengenai struktur dan peran pemerintah dalam membuat kebijakan, pemahaman mengenai penguatan kebijakan yang meliputi masukan opini dari mahasiswa dan media massa kepada pemerintah, dan sejauh mana partisipasi mahasiswa dalam berpolitik dan bernegara serta sejauh mana pemahamannya mengenai hak dan kewajiban sebagai warga negara.

Berdasarkan uraian diatas maka kerangka penelitian ini adalah sebagai berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Pikir

D. Hipotesis

Berdasarkan latar belakang, tinjauan pustaka, dan kerangka berpikir dari permasalahan di atas, maka ditentukan hipotesis dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

$H_0: \rho \neq 0$ = Tidak ada pengaruh literasi politik terhadap budaya politik partisipan mahasiswa PPKn FKIP Universitas Lampung.

$H_a: \rho = 0$ = Ada pengaruh literasi politik terhadap budaya politik partisipan mahasiswa PPKn FKIP Universitas Lampung.

III. METODOLOGI PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Penelitian ini juga menggunakan bantuan aplikasi SPSS Versi 25 dan Microsoft Excel 2007. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah pengaruh literasi politik terhadap budaya politik partisipan mahasiswa PPKn Universitas Lampung. Data penelitian yang nantinya diperoleh adalah berupa skor (angka) dan proses melalui pengolahan data menggunakan statistik, serta selanjutnya akan dideskripsikan guna mendapatkan gambaran mengenai variabel literasi politik dengan variabel budaya politik partisipan.

Penelitian ini juga digunakan oleh peneliti untuk melihat pengaruh antar variabel bebas yaitu literasi politik dengan variabel terikat yaitu budaya politik partisipan. Adapun teknik analisis data yang digunakan untuk menguji hipotesis pengaruh literasi politik terhadap budaya politik partisipan menggunakan teknik analisis *Product Moment person*, karena data yang digunakan adalah data interval.

B. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi merupakan salah satu elemen penting di dalam sebuah penelitian, karena keberadaan dari populasi akan menentukan validitas data yang akan diperoleh dari hasil suatu penelitian. Senada dengan pernyataan di atas,

Sujarweni (2022) mengutarakan pengertian populasi yaitu keseluruhan jumlah yang terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai karakteristik dan kualitas tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk kemudian ditarik kesimpulannya. Dalam penelitian ini, populasinya yaitu mahasiswa Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan FKIP Universitas Lampung angkatan 2019, angkatan 2020, angkatan 2021, dan angkatan 2022. Adapun rincian masing-masing tiap angkatan mahasiswa PPKn FKIP Universitas Lampung yaitu sebagai berikut:

Tabel 3.1 Data Jumlah Mahasiswa Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan FKIP Universitas Lampung.

No	Mahasiswa	Total
1	Angkatan 2019	66
2	Angkatan 2020	81
3	Angkatan 2021	90
4	Angkatan 2022	119
Total		356

Sumber: Data Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Tahun 2022.

2. Sampel

Sampel adalah bagian dari sejumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi yang digunakan untuk penelitian. Bila populasi besar, peneliti tidak mungkin mengambil semua untuk penelitian misal karena terbatasnya dana, tenaga dan waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu. Menurut Arikunto (2019) menjelaskan bahwasannya apabila subjek kurang dari 100 lebih baik diambil semua sehingga penelitiannya merupakan penelitian populasi. Selanjutnya jika jumlah subyeknya lebih dari 100 dapat diambil antara 10%-15% atau lebih.

Berdasarkan pendapat diatas maka dalam penelitian ini sampel yang diambil adalah 10% dari jumlah populasi yang ada serta dihitung dengan menggunakan rumus Taro Yamane sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{N \cdot d^2 + 1}$$

Keterangan :

N = Jumlah Sampel

N = Jumlah Populasi

d^2 = Presisi (ditetapkan 10%)

(Riduan dan Akdon, 2009)

$$n = \frac{356}{356 \times 0,1^2 + 1}$$

$$n = \frac{356}{356 \times 0,01 + 1}$$

$$n = \frac{356}{3,56 + 1} = \frac{356}{4,56} = 78,07 = 78$$

Dari perhitungan diatas didapatkan jumlah sampel sebanyak 78 responden. Kemudian ditentukan jumlah masing-masing sampel menurut jumlah mahasiswa PPKn yang berada di masing-masing sampel menurut jumlah mahasiswa yang berada di angkatan 2019, angkatan 2020, angkatan 2021, dan angkatan 2022 secara *random sampling* dengan rumus sebagai berikut:

$$ni = \frac{Ni}{N} \cdot n$$

Keterangan :

ni = Jumlah sampel menurut jumlah angkatan

n = Jumlah sampel seluruhnya

Ni = Jumlah populasi menurut jumlah kelas

N = Jumlah populasi seluruhnya

(Riduan dan Akdon, 2009)

Berdasarkan rumus diatas, maka dapat diperoleh jumlah sampel menurut jumlah masing-masing kelas sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Angkatan 2019} &= \frac{66}{356} \times 78 = 14,46 = 14 \text{ mahasiswa} \\ \text{Angkatan 2020} &= \frac{81}{356} \times 78 = 17,74 = 18 \text{ mahasiswa} \\ \text{Angkatan 2021} &= \frac{90}{356} \times 78 = 19,71 = 20 \text{ mahasiswa} \\ \text{Angkatan 2022} &= \frac{119}{356} \times 78 = 26,07 = 26 \text{ mahasiswa} \end{aligned}$$

Tabel 3.2 Data Jumlah Mahasiswa Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan FKIP Universitas Lampung yang Menjadi Sampel.

No	Mahasiswa	Jumlah Mahasiswa	Sampel
1	Angkatan 2019	66	14
2	Angkatan 2020	81	18
3	Angkatan 2021	90	20
4	Angkatan 2022	119	26
Jumlah		356	78

Sumber: Data Telah Diolah Oleh Peneliti Pada Bulan Agustus 2022

Berdasarkan tabel diatas, sampel pada penelitian ini yang diambil adalah sebesar 10% dari jumlah populasi mahasiswa program studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan FKIP Universitas Lampung yang melebihi 100 dengan jumlah 356 maka didapat sebanyak 78 responden.

C. Variabel Penelitian

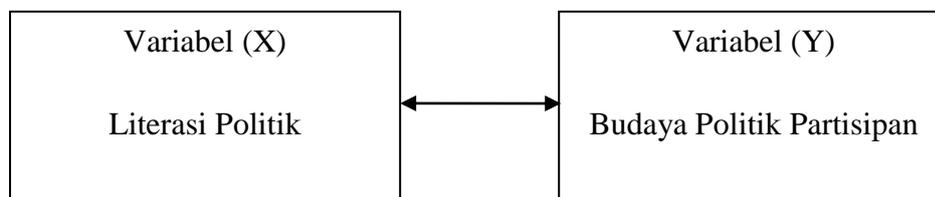
Pengertian variabel penelitian menurut Sugiyono (dalam Sujarweni, 2022) adalah sesuatu hal yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, dan kemudian ditarik kesimpulannya. Pada penelitian ini, variabel penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

1. Variabel Bebas (*Independent Variabel*)

Sujarweni (2022) menuturkan pengertian variabel bebas sebagai sebuah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen. Adapun variabel bebas (*Independent Variabel*) pada penelitian adalah Literasi Politik (X).

2. Variabel Terikat (*Dependent Variabel*)

Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau akibat, karena adanya variabel bebas (Sujarweni, 2022). Pada penelitian kali ini yang menjadi variabel terikat yaitu Budaya Politik Partisipan (Y).



Gambar 3.1 Keterkaitan Antar Variabel X dan Y

D. Definisi Konseptual dan Definisi Operasional

1. Definisi Konseptual

Definisi konseptual merupakan batasan terhadap masalah-masalah variabel yang dijadikan pedoman dalam penelitian sehingga akan memudahkan dalam mengoperasionalkannya di lapangan. Untuk memahami dan memudahkan dalam menafsirkan banyak teori yang ada dalam penelitian ini, maka akan ditentukan beberapa definisi konseptual yang berhubungan dengan yang akan diteliti, sebagai berikut:

a. Literasi Politik

Literasi Politik adalah bauran dari pemahaman, pengetahuan, sikap warga negara, sikap warga negara dalam merespon demokrasi secara substantif. Literasi politik merupakan upaya memahami seputar isu utama politik, apa keyakinan utama para kontestan, dan bagaimana kecenderungan mereka mempengaruhi individu atau kelompok lain.

b. Budaya Politik Partisipan

Budaya politik merupakan deskripsi konseptual yang menggambarkan budaya politik dengan kesadaran politik yang sangat tinggi. Masyarakat mampu memberikan opininya dan aktif dalam kegiatan politik. Namun dalam suatu masyarakat kerap kali ditemukan inklanasi kepada salah satu tipe budaya politik, misalnya, dalam budaya politik partisipan

masih dapat dijumpai individu-individu yang tidak menaruh minat pada obyek-obyek politik secara luas.

2. Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan sebuah bentuk definisi dari variabel-variabel yang akan diteliti secara operasional dalam kaitannya dengan proses pengukuran variabel-variabel tersebut (Sarwono, 2017). Definisi diatas dapat disederhanakan bahwa definisi operasional adalah variabel penelitian dimaksudkan untuk memahami arti setiap variabel penelitian sebelum dilakukan analisis. Oleh karena itu, terdapat beberapa konsep dalam penelitian ini yang perlu untuk di operasionalkan, diantaranya adalah sebagai berikut:

a. Literasi Politik

Definisi operasional literasi politik adalah untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh yang didapatkan serta ditimbulkan setelah mempelajari pengaruh literasi politik pada Mahasiswa PPKn FKIP Universitas Lampung yang dalam fakta dilapangan literasi bangsa indonesia cukup memprihatinkan. Dalam penelitian ini untuk mengukur pengaruh literasi politik, tataran praksisnya dipengaruhi oleh lima faktor. Menurut Mudhok (dalam Heryanto, 2021) kelima faktor tersebut menjadi indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat literasi politik warga negara yaitu sebagai berikut:

- 1) Kehirauan dan kesadaran pentingnya aktivitas dan institusi politik, kewenangan, dan peranannya.
- 2) Kemampuan untuk membuat opini dan otonomi posisi dalam proses politik dalam rangka menghasilkan suatu *outcome* politik.
- 3) Pengetahuan mengenai kebijakan, perencanaan, dan anggaran pemerintah untuk pembangunan dan pelayanan publik.
- 4) Partisipasi dalam kegiatan politik.

b. Budaya Politik Partisipan

Budaya politik Partisipan merupakan orientasi politik yang secara eksplisit ditujukan kepada sistem secara keseluruhan, bahwa terhadap struktur, proses politik dan administratif, tegasnya terhadap input maupun output dari sistem politik itu. Dalam budaya itu seseorang atau orang lain dianggap sebagai anggota aktif dalam kehidupan politik, memiliki kesadaran terhadap hak serta tanggung jawabnya..

Berdasarkan judul penelitian yaitu pengaruh literasi politik terhadap budaya politik partisipan mahasiswa PPKn FKIP Universitas Lampung. Maka, terdapat indikator yang digunakan dalam budaya politik partisipan mahasiswa setelah ditelusuri hubungannya dengan literasi politik. Menurut Almond dan Verba (dalam Novianasari, 2016), budaya politik partisipan merupakan budaya politik yang demokratik. Dalam hal ini, akan mendukung terbentuknya sebuah sistem politik yang demokratik dan stabil. Adapun indikator budaya politik partisipan yang dikemukakan oleh Almond dan Verba yaitu:

1. Tingkat pengetahuan umum mahasiswa mengenai sistem politik negaranya.
2. Pemahaman mahasiswa mengenai struktur dan peran pemerintah dalam membuat kebijakan
3. Pemahaman mengenai penguatan kebijakan yang meliputi masukan opini dari mahasiswa dan media massa kepada pemerintah.
4. Sejauh mana partisipasi mahasiswa dalam berpolitik dan bernegara, serta sejauh mana pemahamannya mengenai hak dan kewajiban sebagai warga negara.

E. Teknik Pengumpulan Data

Pada hakikatnya data merupakan sebuah hasil pencatatan peneliti, baik yang berupa fakta ataupun angka (Arikunto, 2019). Oleh karenanya, teknik pengumpulan data merupakan sebuah cara yang digunakan untuk memperoleh pencatatan dalam segala informasi berupa fakta dan angka atau hal-hal sebagian atau ukuran keseluruhan mengenai suatu variabel atau

seluruh populasi secara lengkap sehingga harapannya dapat menjadi pendukung keberhasilan dalam sebuah penelitian. Adapun teknik yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data yaitu:

1. Angket

Fathoni (2011) memaparkan bahwasannya angket merupakan sebuah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui penyebaran kuesioner (daftar pertanyaan/isian) untuk kemudian diisi langsung oleh responden seperti yang dilakukan dalam penelitian untuk menghimpun sebuah informasi data. Penelitian ini menggunakan teknik angket sebagai teknik pokok untuk mengumpulkan data berupa pernyataan tertulis yang diberikan kepada responden mengenai pengaruh literasi politik terhadap budaya politik partisipan mahasiswa PPKn FKIP Universitas Lampung yang bertempat di Program Studi PPKn FKIP Universitas Lampung. Teknik angket ini bertujuan untuk mendapatkan data dan informasi langsung dari responden. Sasaran dalam penelitian atau pemberian angket ini adalah mahasiswa PPKn FKIP Universitas Lampung.

Dalam penelitian ini menggunakan angket tertutup sehingga responden dapat menjawab dengan tiga alternatif jawaban (Sangat Setuju, Setuju dan Tidak Setuju), kemudian selanjutnya responden akan memilih salah satu jawaban dengan memberikan tanda *checkbox* pada jawaban yang telah dipilih serta dipersiapkan dan jawaban yang diberikan memiliki bobot nilai bervariasi. Variasi nilai atau skor dari masing-masing jawaban dengan kriteria sebagai berikut:

- a. Untuk jawaban yang sangat sesuai dengan harapan akan diberikan skor atau nilai tiga (3).
- b. Untuk jawaban yang sesuai dengan harapan akan diberikan skor atau nilai dua (2).
- c. Untuk jawaban yang tidak sesuai dengan harapan akan diberikan skor atau nilai satu (1).

Berdasarkan keterangan diatas, maka nantinya akan diketahui nilai tertinggi adalah skor atau nilai tiga (3) sedangkan nilai terendahnya adalah mendapatkan nilai atau skor satu (1).

2. Wawancara

Menurut esterberg dalam sugiyono (2014) wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan dalam suatu topik tertentu. Sedangkan Sugiyono (2012) mengemukakan bahwa teknik wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang diteliti. Oleh karena itu, wawancara ialah proses pengajuan pertanyaan yang diajukan kepada narasumber untuk mengumpulkan data-data yang mendukung penelitian.

Teknik wawancara ini digunakan sebagai penunjang dalam penelitian untuk mengumpulkan data tambahan. Peneliti melakukan wawancara secara langsung dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan tanpa disiapkan sebelumnya (wawancara bebas). Wawancara dalam penelitian ini dilakukan dengan mahasiswa Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan FKIP Universitas Lampung untuk mendapatkan data tambahan berupa informasi terkait pengaruh literasi politik terhadap budaya politik partisipan mahasiswa PPKn FKIP Universitas Lampung.

F. Uji Validitas dan Uji Reliabilitas

1. Uji Validitas

Validitas adalah sebuah ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat kevalidan atau kesahihan suatu instrumen (Arikunto, 2006). Sedangkan menurut Azhar dan Ardi (2008) menjelaskan bahwa validitas adalah sebuah skala pengukuran dikatakan valid apabila skala tersebut digunakan untuk mengukur apa yang diukur.

Berdasarkan beberapa pendapat diatas, dapat di simpulkan bahwasannya uji validitas adalah suatu kontrol khusus terhadap teori-teori yang telah menghasilkan indikator variabel yang disesuaikan dengan maksud serta isi dari butir soal yang dilakukan melalui koreksi angket dan konsultasi dengan Pembimbing I dan Pembimbing II.

Uji validitas dilakukan pada masing-masing variabel penelitian. Cara mengukur variabel konstruk yaitu mencari korelasi antara masing-masing pertanyaan dengan skor total menggunakan rumus teknik korelasi *pearson product moment*, sebagai berikut:

$$r_{xy} = \frac{n \sum xy - (\sum x) (\sum y)}{\sqrt{[N \sum x^2 - (\sum x)^2][N \sum y^2 - (\sum y)^2]}}$$

Keterangan :

- r_{xy} = Koefisien korelasi pearson validitas
 X = Skor tanggapan responden atas setiap pertanyaan
 Y = Skor tanggapan responden atas seluruh pertanyaan
 N = Banyaknya jumlah/subjek responden

(Sujarweni, 2012)

Setelah mengetahui hasil dari rumus *pearson product moment*, kemudian peneliti juga melakukan pengujian kembali angket menggunakan uji dua sisi dengan taraf signifikansi 0,05 dengan kriteria pengambilan keputusan yaitu jika $r_{hitung} \geq r_{tabel}$ maka instrumen dinyatakan valid. Untuk memudahkan uji coba dalam penelitian ini maka dilakukan dengan menggunakan bantuan program *Statistical Product and Service Solution* (SPSS). Adapun kriteria diterima atau tidaknya suatu data valid atau tidak dalam program SPSS (Priyanto, 2008).

Berdasarkan nilai korelasi :

- a. Jika $r_{hitung} > r_{tabel}$ maka item dinyatakan valid.
- b. Jika $r_{hitung} < r_{tabel}$ maka item dinyatakan tidak valid.

Berdasarkan signifikansi :

- a. Jika nilai signifikansi $> \alpha$ (0,05) maka item dinyatakan tidak valid.
- b. Jika nilai signifikansi $< \alpha$ (0,05) maka item dinyatakan valid.

2. Uji Reliabilitas

Menurut Arikunto (2011) menjelaskan bahwasanya reliabilitas menunjuk pada satu pengertian bahwasannya suatu instrumen cukup serta dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul data karena instrumen tersebut telah baik. Untuk uji reliabilitas dilakukan pada masing-masing variabel penelitian Cara mencari besaran angka reliabilitas dengan menggunakan metode *Cronbach' Alpha* digunakan rumus berikut (Sulisyanto dalam Wibowo, 2012).

$$r_{11} = \left[\frac{k}{k-1} \right] \left[1 - \frac{\sum \sigma b^2}{\sigma 1^2} \right]$$

Keterangan:

- r_{11} = Reliabilitas instrumen
 K = Jumlah butir pertanyaan atau pernyataan
 $\sum \sigma b^2$ = Jumlah variabel pada butir
 $\sigma 1^2$ = Varian total

Menurut Sekara dalam Wibowo (2012) memaparkan bahwasannya kriteria penilaian uji reliabilitas kurang dari 0,6 adalah kurang baik, sedangkan 0.7 dapat diterima dan diatas 0,8 adalah baik. Beberapa peneliti berpengalaman merekomendasikan dengan cara membandingkan nilai dengan tabel kriteria indeks koefisien pada tabel berikut ini:

Tabel 3.3. Koefisien Reliabilitas

No	Nilai Interval	Kriteria
1	<0,20	Sangat Rendah
2	0,20-0,399	Rendah
3	0,40-0,599	Cukup
4	0,60-0,799	Tinggi
5	0,80-1,00	Sangat Tinggi

Sumber: Wibowo (2012)

Selain itu, nilai reliabilitas dapat dicari dengan membandingkan nilai *cronbach's alpha* pada perhitungan SPSS dengan nilai r tabel menggunakan uji satu sisi pada taraf signifikansi 0,05 (SPSS secara *default* menggunakan nilai ini) dan $dfN-2$, N adalah banyaknya sampel dan K adalah jumlah variabel yang diteliti, kriteria reliabilitasnya yaitu (Wibowo, 2012) :

- a. Jika $r_{hitung} (r_{alpha}) > r_{tabel}$ maka butir pertanyaan/pernyataan tersebut reliabel.
- b. Jika $r_{hitung} (r_{alpha}) < r_{tabel}$ maka butir pertanyaan/pernyataan tersebut tidak reliabel.

Adapun langkah-langkah analisis data untuk menguji reliabilitas dilakukan dengan program SPSS adalah sebagai berikut :

- a. Menghitung jumlah skor jawaban responden tiap item pertanyaan/pernyataan, dalam hal ini skor total tidak di ikut sertakan.
- b. Melakukan analisis menggunakan perintah *analyze* kemudian *scale reliability analysis*.
- c. Membandingkan nilai *cronbach's alpha* dengan r_{tabel} .

G. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk mengubah hasil data dari penelitian menjadi sebuah informasi baru yang dapat digunakan untuk membuat suatu kesimpulan. Analisis data juga bertujuan untuk menyederhanakan suatu informasi baru yang nantinya akan lebih mudah untuk dipahami. Analisis data pada penelitian ini akan dilakukan adalah uji prasyarat analisis dan analisis akhir atau uji hipotesis.

1. Analisis Ditribusi Frekuensi

Analisis data frekuensi dilakukan terhadap hasil pengambilan data dari angket (Literasi Politik) dan angket (Budaya Politik Partisipan). Analisis distribusi frekuensi dilakukan untuk mengetahui klasifikasi beserta presentase tingkat pengaruh dari literasi politik terhadap budaya politik partisipan mahasiswa. Analisis ditribusi frekuensi menggunakan rumus

interval yang dikemukakan oleh Hadi dalam Wahab (2021) dengan persamaan sebagai berikut:

$$I = \frac{NT - NR}{K}$$

Keterangan:

- I = Interval
 NT = Nilai tertinggi
 NR = Nilai terendah
 K = Kategori

Selanjutnya untuk mengetahui tingkat presentase digunakan rumus presentase sebagai berikut :

$$P = \frac{F}{N} \times 100\%$$

Keterangan:

- P = Besarnya presentase
 F = Jumlah skor yang diperoleh diseluruh item
 N = Jumlah perkalian seluruh item dengan responden

Selanjutnya untuk mengetahui banyaknya presentase yang diperoleh maka digunakan dengan kriteria yang dapat ditafsirkan sebagai berikut:

- 76% - 100% = Baik
 56% - 75% = Cukup
 40% - 55% = Kurang baik
 0% - 39% = Tidak baik

(Arikunto, 2019).

2. Uji Prasyarat

a. Uji Normalitas

Uji normalitas adalah suatu percobaan untuk mengetahui apakah data sampel berdistribusi normal atau tidak. Uji normalitas menggunakan SPSS 25 untuk memperoleh koefisiennya. Dalam penelitian ini dilakukan dengan uji *kolmogrove smirnov*, karena sampel yang digunakan merupakan mempunyai skala yang besar ≥ 50 . Berikut rumus uji *Kolmogrov Smirnov* :

$$D = |F_s(x) - F_t(x)| \max$$

Keterangan:

$F_s(x)$ = Distribusi frekuensi kumulatif sampel

$F_t(x)$ = Distribusi frekuensi kumulatif teoritis

Pedoman dalam pengambilan hasil akhir menggunakan uji *kolmogrov* adalah jika nilai *Sig* atau probabilitas (p) $\geq 0,05$ data bertribusi normal dan jika nilai *Sig* atau probabilitas (p) $\leq 0,05$ data bertribusi tidak normal. Hal ini dilakukan untuk menentukan data statistik yang digunakan. Jika data berdistribusi normal dapat digunakan metode statistik parametrik, sedangkan jika data tidak berdistribusi tidak normal maka dapat menggunakan metode nonparametrik (Sugiyono, 2008).

b. Uji Linieritas

Uji linieritas bertujuan untuk mengetahui apakah Literasi Politik (Variabel X) dan Budaya Politik Partisipan (Variabel Y) mempunyai hubungan yang linier atau tidak secara signifikan. Menurut Prayitno (2008) memaparkan bahwasannya uji linieritas biasanya digunakan sebagai uji prasyarat dalam analisis korelasi atau regresi linier. Pengujian pada SPSS 25 dengan menggunakan *Test For Liniarty* pada taraf *sig* 0,05 dan dua variabel dapat dikatakan mempunyai hubungan apabila signifikansi linier berkurang dari 0,05. Uji yang digunakan adalah uji F dengan rumus sebagai berikut :

$$F_{reg} = \frac{RK_{reg}}{RK_{res}}$$

Keterangan :

F_{reg} = Harga bilangan F untuk garis regresi

RK_{reg} = Rerata kuadrat garis regresi

RK_{res} = Rerata kuadrat residu

(Sutrisno Hadi, 2014)

Dasar pengambilan keputusan uji linearitas sebagai berikut:

- 1) Jika nilai Sig > 0.05, maka mempunyai hubungan yang linear secara signifikansi antara variabel X dan variabel Y.
- 2) Jika nilai Sig < 0.05, maka tidak mempunyai hubungan yang linear secara signifikansi antara variabel X dan variabel Y.

3. Analisis Data

a. Uji Regresi Sederhana

Selanjutnya dalam penelitian ini akan diujikan menggunakan rumus regresi linier. Untuk mempermudah dalam uji linieritas maka pada penelitian ini menggunakan daftar analisis varian (anova) dengan ketentuan apabila $F_{hitung} \leq F_{tabel}$ pada taraf 5% dengan dk pembilang (k-2) dan dk penyebut (n-k), maka regresi linier.

Data hasil dari analisis regresi ini digunakan untuk melihat pengaruh antara variabel X terhadap variabel Y, yaitu Pengaruh Pengaruh Literasi Politik (X) Terhadap Budaya Politik Partisipan (Y).

Adapun persamaan dari regresi linier adalah sebagai berikut :

$$\bar{Y} = a + bX$$

Keterangan:

\bar{Y} = Subyek pada variabel dependent

- X = Prediktor
 a = Harga Y ketika harga $X = 0$ (Harga Konstanta)
 b = Koefisien regresi

(Sugiyono, 2019).

b. Uji Hipotesis

Uji hipotesis dilakukan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh positif yang signifikan dari Literasi Politik (X) sebagai variabel bebas dengan Budaya Politik Partisipan (Y) sebagai variabel terikat uji hipotesis dilakukan menggunakan SPSS versi 25 berdasarkan hasil uji analisis regresi linier sederhana untuk memperoleh koefisien signifikannya. Dasar pengambilan keputusan hasil uji hipotesis adalah sebagai berikut:

- 1) Jika nilai signifikansi (Sig.) lebih kecil < dari probabilitas 0,05 maka ada pengaruh literasi politik (X) terhadap budaya politik partisipan (Y).
- 2) Jika nilai signifikansi (Sig.) lebih besar > dari probabilitas 0,05 maka tidak ada pengaruh literasi politik (X) terhadap budaya politik partisipan (Y).

Dalam pengujian hipotesis kali ini penelitian menggunakan uji t Menurut Prayitno (2018) uji t digunakan untuk mengetahui suatu pengaruh pada variabel-variabel bebas (*independent*) secara individu atau parsial terhadap suatu variabel terikat (*dependent*). Adapun rumus t hitung pada analisis regresi adalah sebagai berikut:

$$t_{hitung} = \frac{b}{sb}$$

Keterangan:

- b = Koefisien Regresi
 sb = Standar Error

Ataupun dapat dicari dengan rumus sebagai berikut:

$$t_{hitung} = \frac{r\sqrt{n-1}}{\sqrt{n-r^2}}$$

Keterangan :

r = Koefisien Korelasi Sederhana

n = Jumlah Data atau kasus

Dasar dari pengambilan keputusan Uji t dilakukan sebagai berikut:

- 1) Apabila nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ dengan $dk = n-2$ atau $54-2$ dan $\alpha 0,05$ maka H_0 ditolak dan sebaliknya H_1 diterima.
- 2) Apabila probabilitas (sig) $0,05$ maka H_0 diterima dan sebaliknya H_1 ditolak.

Menurut Sugiyono (2014) untuk menafsirkan hipotesis yang diperoleh digunakan pengkategorian atau klasifikasi sebagai berikut:

0,00 - 0,199	=	kategori sangat rendah
0,20 - 0,399	=	kategori rendah
0,40 - 0,599	=	kategori sedang
0,60 - 0,799	=	kategori kuat
0,80 - 1,000	=	kategori sangat kuat

c. Uji Koefisien Determinasi

Menurut Ghazali (2011) Uji koefisien determinasi (r^2) digunakan untuk mengetahui presentase sumbangan pengaruh serentak variabel-variabel bebas terhadap variabel terikat. Koefisien determinasi dapat dilihat dari nilai *adjusted* r^2 dimana untuk menginterpretasikan besarnya nilai koefisien determinasi harus diubah kedalam bentuk persentase. Sisa dari total (100%) yang artinya dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian. Koefisien determinasi bertujuan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen Nilai koefisien determinasi adalah $0 < r^2 < 1$. Jika nilai koefisien determinasi yang mendekati angka nol (0) berarti

kemampuan model dalam menerangkan variabel terikat sangat terbatas. Sebaliknya apabila nilai koefisien determinasi variabel mendekati satu (1) berarti kemampuan variabel bebas dalam menimbulkan keberadaan variabel terikat semakin kuat. Uji koefisien determinasi dilakukan untuk mengetahui besarnya kontribusi atau pengaruh variabel X terhadap Y dan dapat menggunakan rumus sebagai berikut :

$$KD = (r^2) \times 100\%$$

Keterangan :

KD = Nilai Koefisien Determinasi

r = Nilai Koefisien Korelasi

(Riduwan, 2009)

H. Langkah-Langkah Penelitian

Langkah-langkah penelitian merupakan suatu bentuk upaya mempersiapkan sebelum melakukan penelitian yang bersifat sistematis yang didalamnya meliputi adanya perencanaan, prosedur, sampai dengan pelaksanaan penelitian dilapangan. Hal ini dilakukan agar penelitian dapat dilaksanakan sesuai dengan appa yang telah direncanakan. Adapun langkah-langkah penelitian yang peneliti lakukan yaitu sebagai berikut:

1. Persiapan Pengajuan Judul

Langkah awal dalam penelitian ini peneliti mengajukan judul yang terdiri dari dua alternatif pilihan kepada dosen pembimbing akademik. Setelah mendapat persetujuan dari dosen pembimbing akademik, selanjutnya peneliti mengajukan judul tersebut kepada Ketua Program Studi PPKn dan disetujui pada tanggal 15 Juli 2022 sekaligus ditentukan dosen pembimbing utama yaitu Drs. Berchah Pitoewas, M.H. dan pembimbing pembantu yaitu Ana Mentari, S.Pd. M. Pd.

2. Penelitian Pendahuluan

Setelah mendapatkan surat izin penelitian pendahuluan dari Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung dengan Nomor 5347/UN26.13/PN.01.00/2022 pada tanggal 11 Agustus 2022. Maka penelitian ini dimulai dengan melakukan penelitian pendahuluan dilokasi penelitian yaitu Program Studi PPKn FKIP Universitas Lampung. Adapun maksud dilakukannya penelitian pendahuluan ini adalah untuk memperoleh data mengenai jumlah mahasiswa serta gambaran secara umum tentang berbagai hal yang akan diteliti dalam penyusunan proposal penelitian. Penelitian ini ditunjang oleh beberapa literatur dan arahan dari dosen pembimbing.

3. Pengajuan Rencana Penelitian

Rencana penelitian ini dilakukan melalui proses konsultasi sebagai salah satu prosedur dalam memperoleh persetujuan untuk melaksanakan seminar proposal. Melalui beberapa tahapan yaitu dari adanya perbaikan proposal sampai dengan akhirnya proposal disetujui oleh Pembimbing II pada tanggal 6 Oktober 2022 dan Pembimbing I pada tanggal 12 Oktober 2022. Lalu, seminar proposal dilaksanakan pada tanggal 30 November 2022. Adapun tujuan dari diadakan nya seminar proposal tersebut adalah untuk memperoleh masukan, kritik dan saran demi kesempurnaan skripsi. Setelah selesai melaksanakan seminar proposal, peneliti melakukan perbaikan sesuai dengan masukan, kritik dan saran dari dosen pembahas.

4. Penyusunan Alat Pengumpulan Data

Peneliti menggunakan angket sebagai alat bantu dalam pengumpulan data. Kemudian angket diberikan kepada seluruh responden yang berjumlah 78 Mahasiswa dengan jumlah soal pernyataan 15, dalam rangka penyusunan angket tersebut, peneliti melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Membuat kisi-kisi angket tentang Pengaruh Literasi Politik Terhadap Budaya Politik Partisipan Mahasiswa PPKn FKIP Universitas Lampung.

- b. Membuat beberapa item pernyataan angket mengenai Pengaruh Literasi Politik Terhadap Budaya Politik Partisipan Mahasiswa PPKn FKIP Universitas Lampung.
- c. Mengkonsultasikan angket ke Pembimbing I dan Pembimbing II, setelah angket tersebut disetujui oleh Pembimbing I dan pembimbing II. Kemudian mengadakan uji coba kepada sepuluh orang responden diluar dari sampel yang sebenarnya.

I. Pelaksanaan Uji Coba Penelitian

Pelaksanaan penelitian ini dilakukan dengan membawa surat izin penelitian dari Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung dengan nomor surat 2043/UN26.13/PN.01.00/2023 yang ditunjukkan kepada Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung. Setelah mendapatkan surat pengantar dari Dekan, kemudian peneliti mengadakan penelitian yang dilaksanakan pada tanggal 6 Maret 2023, dalam penelitian ini peneliti melakukan uji coba angket kepada 10 responden diluar sampel yang sebenarnya. Pada penelitian ini dilakukan uji coba yaitu uji coba validitas dan uji coba reliabilitas.

1. Uji Coba Validitas Angket

Uji validitas ini dilakukan dengan perhitungan data menggunakan bantuan Microsoft Excel dalam instrumen yang berbentuk angket untuk variabel yaitu Pengaruh Literasi Politik (Variabel X) dan Budaya Politik Partisipan (Variabel Y). Pengujian ini menggunakan taraf signifikansi 0,05 dengan kriteria pengambilan keputusan yaitu apabila $r_{hitung} \geq r_{tabel}$ maka instrumen dapat dinyatakan valid. Sedangkan apabila $r_{hitung} \leq r_{tabel}$ maka instrumen dinyatakan tidak valid. Untuk memudahkan uji validitas pada penelitian ini maka dapat dilakukan dengan menggunakan bantuan program *Statistical Product and Service Solution (SPSS)* versi 25. Adapun langkah-langkah dalam menghitung validitas menggunakan bantuan SPSS versi 20 yaitu: (1) Masukkan seluruh data dan skor total; (2) *Analyze >> Correlate >> Bivariate*; (3) Masukkan seluruh item ke dalam kotak

Variabels; (4) Klik *Pearson >> OK*. Output hasil uji validitas angket dengan bantuan SPSS versi 25 dapat dilihat pada lampiran.

Dengan hasil perhitungan data menggunakan bantuan SPSS versi 25, maka untuk angket Pengaruh Literasi Politik (X) dari seluruh item pernyataan hanya diperoleh beberapa item pernyataan yang valid karena setiap item $r_{hitung} > r_{tabel}$ dengan level signifikansi sebesar 5% (0,05) maka dari 47 item pernyataan hanya didapatkan sebanyak 28 item pernyataan saja yang dinyatakan valid dan sebanyak 19 item pernyataan yang dinyatakan tidak valid dan tidak diikutsertakan dalam penelitian yang sesungguhnya. Sedangkan, pada angket variabel (Y) atau Budaya Politik Partisipan menunjukkan bahwa dari seluruh item pernyataan hanya diperoleh beberapa item pernyataan yang valid karena setiap item $r_{hitung} > r_{tabel}$ dengan level signifikansi sebesar 5% (0,05) maka dari 38 item pernyataan hanya didapatkan sebanyak 29 item pernyataan saja yang dinyatakan valid dan sebanyak 9 item pernyataan yang dinyatakan tidak valid sehingga tidak bisa diikutsertakan dalam penelitian yang sesungguhnya

Berdasarkan hasil perhitungan uji validitas menggunakan rumus *Pearson Product Moment* dengan bantuan menggunakan SPSS versi 25, maka dapat disimpulkan bahwa dari seluruh item pernyataan dari variabel X maupun variabel Y sebanyak 85 item pernyataan hanya 57 item pernyataan. Dari uraian diatas, dapat kita temukan bahwa item pernyataan yang tidak valid dari kedua variabel yaitu sebanyak 28 item pernyataan sehingga 57 item pernyataan yang masing-masing terdiri dari 28 item pernyataan valid dari variabel X dan 29 item pernyataan yang valid dari variabel Y sehingga dari keseluruhan item pernyataan yang valid dapat digunakan untuk mengukur kesahihan indikator yang digunakan. Data yang valid tersebut kemudian dapat menjadi item pernyataan yang akan dilanjutkan untuk penelitian yang sesungguhnya.

2. Uji Coba Reliabilitas Angket

Uji reliabilitas ini dilakukan dengan menghitung koefisien pada *Cronbach's Alpha* yang diperoleh dari data hasil uji coba angket. Untuk

pengujian reliabilitas ini peneliti menggunakan bantuan *Statistical Product and Service Solution* (SPSS) versi 25. Adapun langkah langkah dalam menghitung reliabilitas dengan menggunakan SPSS versi 25 yaitu: (1) masukkan data yang sama dengan data yang digunakan untuk menghitung validitas; (2) *Analyze >> Scale >> Reliability Analysis*; (3) masukkan nomer item yang valid ke dalam kotak *items*, skor total tidak diikutkan; (4) *Statistics*, pada kotak dialog *Descriptives for klik Scale if item deleted >> Continue >> OK*. *Output* hasil uji reliabilitas angket dengan bantuan SPSS versi 25 dapat dilihat pada lampiran. Penelitian dianggap atau dinyatakan valid apabila suatu instrumen memiliki kriteria penilaian uji reliabilitas, jika reliabilitas kurang dari 0,6 adalah kurang baik, sedangkan apabila uji reliabilitas 0,7 maka dapat diterima dan apabila diatas 0.8 adalah baik. Hasil uji coba angket dari variabel X yang telah diisi oleh sepuluh responden diluar sampel, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.4 Uji Reliabilitas (Variabel X) Kepada Sepuluh Responden Diluar Sampel.

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.751	29

Hasil uji coba angket yang dilakukan dengan menggunakan rumus *Cronbach's Alpha*.

Hasil dari angket/kuisisioner dapat dikatakan reliabel apabila hasil minimalnya 0.6. Dengan demikian angket yang dipakai dalam penelitian ini sudah dapat dinyatakan reliabel atau dapat diandalkan karena setelah dilakukannya analisis menggunakan bantuan SPSS versi 25 menunjukkan hasil akhirnya untuk variabel X nya adalah 0,751 dengan jumlah 28 item pernyataan sehingga dapat dinyatakan bahwa angket dari variabel X memiliki kriteria yang tinggi.

Tabel 3.5 Uji Reliabilitas (Variabel Y) Kepada Sepuluh Responden Diluar Sampel

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.756	30

Hasil dari uji angket yang menggunakan rumus *Cronbach's Alpha*.

Hasil angket dikatakan reliabel apabila hasil minimalnya 0,6. Dengan demikian kuisioner yang dipakai dalam penelitian ini sudah reliabel atau dapat diandalkan kerana setelah dilakukannya analisis menggunakan bantuan SPSS versi 25 pada variabel Y hasil akhirnya memiliki nilai 0,756. Hasil tersebut menunjukkan bahwa lebih dari hasil minimal 0,6 dengan jumlah item pernyataan sebanyak 29 item yang dikatakan valid sehingga dapat pula dinyatakan bahwa angket dari variabel Y masuk ke dalam nilai interval 0,60-0,799 termasuk memiliki kriteria tinggi.

Oleh karenanya, berdasarkan hasil perhitungan dua angket diatas maka dapat disimpulkan bahwa untuk angket Literasi Politik diperoleh nilai reliabilitas sebesar 0,751 ($0,75 > 0,6$) dari 28 item pernyataan yang valid dan dapat dikategorikan memiliki kriteria yang tinggi. Kemudian untuk angket Budaya Politik Partisipan diperoleh nilai reliabilitas sebesar 0,756 ($0,75 > 0,6$) dari 29 item pernyataan yang valid dan dapat dikategorikan memiliki kriteria yang tinggi. Dengan demikian 28 item pernyataan dari variabel X dan 29 item pernyataan dari variabel Y dapat dinyatakan valid dan dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul data karena instrumen tersebut telah baik bahkan dalam angket peneliti kedua variabel dinyatakan tinggi atau secara singkat dinyatakan reliabel sebagai instrumen dalam penelitian.

BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pengujian hipotesis yang telah peneliti lakukan mengenai pengaruh literasi politik terhadap budaya politik partisipan mahasiswa PPKn FKIP Universitas Lampung, dapat disimpulkan bahwasannya adanya pengaruh literasi politik terhadap budaya politik partisipan mahasiswa PPKn FKIP Universitas Lampung. Selain itu, dari data hasil penelitian dan pengujian hipotesis yang peneliti lakukan bahwa literasi politik berpengaruh positif terhadap budaya politik partisipan mahasiswa PPKn FKIP Universitas Lampung. Pengaruh literasi politik berpengaruh sebesar 53,1% terhadap budaya politik partisipan mahasiswa dan sisanya sebesar 46,9% oleh faktor lain diluar faktor literasi politik mahasiswa PPKn yaitu tingkat kesejahteraan kehidupan, kondisi ekonomi, pengaruh orang tua, dan pengalaman berorganisasi. Pengaruh literasi politik terhadap budaya politik partisipan ditunjukkan dengan koefisien regresi yang menunjukkan nilai positif yaitu 0,788 dan nilai signifikansi 0,000 ($< 0,05$). Nilai koefisien regresi memberikan arti bahwa pengaruh literasi politik terhadap budaya politik partisipan berbanding lurus, artinya semakin literasi politik ditingkatkan dan digunakan dalam segala lini khususnya yang berkaitan dengan kegiatan politik maka partisipasi politik kemudian akan meningkat dan akan membentuk budaya politik partisipatif atau yang secara teori disebut dengan budaya politik partisipan.

Bersambung dari data diatas, maka relevan jika dalam latar belakang dinyatakan bahwa kemampuan literasi politik yang baik akan turut berperan

dalam penerapan sistem checks and balances dari masyarakat, oleh masyarakat dan untuk masyarakat dalam rangka turut serta memberikan masukan terhadap berbagai kebijakan pemerintah yang dalam pengertian lain disebut dengan partisipasi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih sebagai langkah awal mewujudkan keadilan sosial bagi segenap masyarakat Indonesia. Lebih daripada itu, dari hasil penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa adanya kesesuaian antara kompetensi mahasiswa dalam bidang literasi politik, budaya politik partisipan mahasiswa, dan tujuan program studi PPKn FKIP Universitas Lampung, mahasiswa PPKn FKIP Universitas Lampung sudah memiliki literasi politik yang baik yang ditandai dengan 47 mahasiswa PPKn FKIP Universitas Lampung dari total 78 sampel yang diteliti atau dapat dibaca dengan presentase 60,26% mahasiswa PPKn FKIP Universitas Lampung sudah memiliki literasi politik yang baik dan mahasiswa sudah memahami dan memiliki pengetahuan budaya politik partisipan dengan baik dengan sebuah pertanda bahwa 45 mahasiswa dari jumlah seluruh sampel sebanyak 78 responden dari mahasiswa PPKn FKIP Universitas Lampung dengan presentase 57.69% dan dapat disimpulkan bahwa mahasiswa PPKn FKIP Universitas Lampung memiliki budaya politik partisipan yang cukup baik. Selain itu mahasiswa PPKn FKIP Universitas Lampung memiliki bentuk partisipasi politik non-konvensional, dan dalam hal tipologi partisipasi politik mahasiswa PPKn FKIP Universitas Lampung mayoritas berpartisipasi secara aktif dan sebagian lain berpartisipasi secara pasif.

B. Saran

Berdasarkan simpulan yang telah dijelaskan oleh peneliti di atas, maka saran yang dapat peneliti berikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Universitas

Bagi universitas diharapkan dapat mempertimbangkan hasil dari penelitian ini untuk dijadikan sebagai pertimbangan dalam memenuhi kebutuhan selama perkuliahan. Selain itu, diharapkan universitas dapat meningkatkan fasilitas penunjang dalam meningkatkan *knowledge* mahasiswa seperti

meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan perpustakaan di universitas guna mendukung mahasiswa dalam mendapatkan informasi khususnya pengetahuan yang berkaitan dengan politik.

2. Bagi Tenaga Pendidik

Bagi tenaga pendidik, terkhusus di bidang Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan diharapkan dapat memberikan upaya yang lebih maksimal dalam mengembangkan pengetahuan peserta didik dengan transfer *civic knowladge* melalui pendidikan formal.

3. Bagi Mahasiswa

Bagi mahasiswa, terkhusus mahasiswa PPKn diharapkan mampu memahami dan menyerap ilmu pengetahuan mengenai *civic knowladge* (pengetahuan kewarganegaraan) khususnya mengenai *political literacy* (literasi politik) karena mengingat betapa pentingnya nilai-nilai yang terkandung di dalamnya untuk diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari sebagai warga negara.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengkaji penelitian lebih lanjut mengenai literasi politik dalam memberikan pengetahuan terkait vitalnya partisipasi politik mahasiswa serta mengkaji lebih banyak sumber referensi yang terkait dengan politik agar hasil penelitiannya dapat lebih baik lagi. Selain itu, peneliti menyarankan jika peneliti selanjutnya ingin meneliti variabel yang serupa agar hendaknya menggunakan indikator yang belum diteliti sehingga dapat memunculkan lebih banyak pembahasan pengetahuan secara lebih luas.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi Sucipto. (2015). Budaya Politik Lokal Dan Partisipasi Politik Masyarakat Di Desa Sumber Sari Kecamatan Sebulu Dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2014. [Online]. Diakses Pada Tanggal 29 Maret 2023.
<https://ejurnal.unikarta.ac.id/index.php/mahakam/article/view/87>
- Agus Srimudin. (2021). Budaya Komunikasi Politik Di Indonesia. [Online]. Diakses Pada Tanggal 29 Maret 2023.
<https://jurnal.uss.ac.id/index.php/jikoba/article/view/152>
- Alfian. (1978). *Pemikiran Dan Perubahan Politik Indonesia*. Jakarta: Gramedia.
- Alil Rinenggo. (2022). Prospek Sistem dan Budaya Politik di Indonesia. [Online]. Diakses Pada Tanggal 29 Maret 2023.
<https://ejournal.undaris.ac.id/index.php/waspada/article/view/308>
- Alexsander Yandra, dkk. (2021). Pendidikan Politik Dan Civic Culture Pada Ibu-Ibu Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK). [Online]. Diakses Pada Tanggal 29 Maret 2023.
<https://ejurnal.sttdumai.ac.id/index.php/abdine/article/view/232>
- Almond, Gabriel A., Sidney Verba. (1965). *The Civic Culture*. Boston. Mass: Little Brown and Company.
- Anang Dony Irawan. (2019). Pendidikan Pemilih Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pemilihan Umum Serentak 2019. [Online]. Diakses Pada Tanggal 29 Maret 2023.
<https://jurnal.umt.ac.id/index.php/replik/article/view/2448>
- Aries Munandar, dan Harmiati. (2017). Profil Literasi Politik Masyarakat Provinsi Bengkulu: Studi Analisis di Kabupaten Bengkulu Selatan dan Kepahiang. [Online]. Diakses Pada Tanggal 28 Maret 2023.
<https://journals.unihaz.ac.id/index.php/mimbar/article/view/767/454>
- Arikunto, Suharsimi. (2006). *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Bina Aksara.
- Arikunto, Suharsimi. (2011). *Penelitian Dan Penelitian Bidang Bimbingan Dan Konseling*. Yogyakarta: Aditya Media.
- Arikunto, Suharsimi. (2019). *Prosedur Penelitian*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Asmika Rahman. (2018). Konsep Dasar Pendidikan Politik Bagi Pemilih Pemula Melalui Pendidikan Kewarganegaraan. [Online]. Diakses Pada Tanggal 29 Maret 2023.
<https://jurnal.unimed.ac.id/2012/index.php/jupis/article/view/8385>

- Bambang Mudjiyanto. (2014). Media Baru, Budaya Politik Dan Partisipasi Politik: Survei Pemilih di Jambi, Babel dan Jakarta Mengenai Aktifitas Komunikasi Politik Melalui Media Baru. [Online]. Diakses Pada Tanggal 29 Maret 2023.
<https://jurnal.kominfo.go.id/index.php/jskm/article/view/180204>
- Basri Seta. (2019). Demokrasi Rosseau. [Online]. Diakses dari 4 Januari 2019.
https://www.researchgate.net/profile/Seta-Basri-2/publication/352981186_Demokrasi_Rousseau/links/60e1cbd3299bf1ea9edec86e/Demokrasi-Rousseau.pdf
- Budiardjo, Miriam. (2007). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Burhanuddin, Agussalim. (2017). *Studi Keamanan Dan Isu-Isu Strategis Global*. Makassar: Unhas.
- Cucu Sutrisno. (2017). Partisipasi Warga Negara Dalam Pilkada. [Online]. Diakses Pada Tanggal 29 Maret 2023.
<https://journal.umpo.ac.id/index.php/JPK/article/view/509>
- Daud M. Liando. (2016). Pemilu Dan Partisipasi Politik Masyarakat: Studi Pada Pemilihan Anggota Legislatif Dan Pemilihan Presiden Dan Calon Wakil Presiden Di Kabupaten Minahasa Tahun 2014. [Online]. Diakses Pada Tanggal 29 Maret 2023.
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lppmekososbudkum/article/view/17190>
- Fathoni, Abdurrahmat. (2011). *Metodologi Penelitian Dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Faulks, Keith. (2021). *Sosiologi Politik: Budaya Politik*. Jakarta: NUSAMEDIA.
- Gabriel A. Almond et.al. (2004). *Comparative Politics Today: a World View*. Eight Edition. Delhi: Dorling Kindersley Publishing, Inc.
- Gatara, S., Said, D. (2007). *Sosiologi Politik*. Bandung: Pustaka Setia.
- Haryanto. (1982). *Sistem Politik: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- Heryanto, Gun Gun. (2019). *Literasi Politik: Dinamika Konsolidasi Demokrasi Indonesia Pascareformasi*. Yogyakarta: IRCiSoD.
- Heryanto, Gun Gun. (2021). *Strategi Literasi Politik: Sebuah Pendekatan Teoritis Dan Praktis*. Yogyakarta: IRCiSoD.
- Indonesia, K. B. B. (2016). *Budaya*.
- Indonesia, K. B. B. (2000). *Literasi*.

- Imam Alfikri Pratama. (2021). Pendidikan Kewarganegaraan Sebagai Wahana Membangun Political Literacy dan Political Culture Warga Negara Muda. [Online]. Diakses Pada Tanggal 29 Maret 2023.
<https://lp2msasbabel.ac.id/jurnal/index.php/sus/article/view/2119>
- Irtanto. (2011). Analisis Partisipasi Politik Pemilih Pada Pemilihan Walikota Blitar Dengan Pendekatan Komunikasi Politik dan Budaya Politik. [Online]. Diakses Pada Tanggal 29 Maret 2023.
<http://bppkibandung.id/index.php/jpk/article/download/165/132>
- Ismaya Indri Astuti. (2021). Penggunaan Media Sosial Instagram Pada Materi Budaya Politik Guna Membangun Civic Participation. [Online]. Diakses Pada Tanggal 29 Maret 2023.
<http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=3034354&val=20674&title=PENGGUNAAN%20MEDIA%20SOSIAL%20INSTAGRAM%20PADA%20MATERI%20BUDAYA%20POLITIK%20GUNA%20MEMBANGUN%20CIVIC%20PARTICIPATION>.
- Kern, R. (2000). *Literacy and Language Teaching*. Oxford: Oxford University Press.
- Khoiruddin Bashori. (2018). Pendidikan Politik Di Era Disrupsi. [Online]. Diakses Pada Tanggal 28 Maret 2023.
<https://www.jurnalsukma.org/index.php/sukma/article/view/02207.2018/40>
- Kondios Meidarlin Pasaribu, dan Pander Lumbanraja. (2020). Hubungan Pembelajaran Materi Budaya Politik Dengan Kesadaran Politik Siswa Kelas Xii Di Sma Swasta Raksana Medan. [Online]. Diakses Pada Tanggal 29 Maret 2023.
<http://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/civiceducation/article/view/544>
- Kukuh Galang Waluyo. (2022). Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK-WBBM) sebagai Wujud Good Governance. [Online]. Diakses dari 30 Juni 2022.
<https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/manokwari/id/data-publikasi/artikel/3006-pembangunan-zona-integritas-menuju-wilayah-bebas-dari-korupsi-dan-wilayah-birokrasi-bersih-dan-melayani-wbk-wbbm-sebagai-wujud-good-governance.html>.
- Kuncoro Galih Pambayun,dkk. (2021). Literasi Politik Pada Wilayah Eks Daerah Tertinggal Indonesia: Studi Kasus Kabupaten Polewali Mandar. [Online]. Diakses Pada Tanggal 28 Maret 2023.
<http://eprints2.ipdn.ac.id/id/eprint/568/>

- Leurison Dolosi, Ronny Gosal, dan Jamin Potabuga. (2022) Budaya Politik Masyarakat Dalam Memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Pada Pemilu Legislatif 2019 Di Kabupaten Halmahera Barat (Suatu studi kasus. Desa Tobelos Kecamatan Ibu Selatan). [Online]. Diakses Pada Tanggal 29 Maret 2023.
<https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/jurnaleksektif/article/view/38787>
- Lutfiana, dkk (2018) Meruntuhkan Status Quo: Partisipasi Politik Dan Kekerasan Dalam Gerakan Mahasiswa Di Indonesia. [Online]. Diakses Pada Tanggal 29 Maret 2023.
<https://eprints.umm.ac.id/45406/>
- Mas'ood, Mohtar dan Colin Mac Andrews. (1993). *Perbandingan Sistem Politik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Maxi Egeten. (2015). Implementasi Budaya Politik Serta Pengaruhnya Terhadap Pembangunan Politik. [Online]. Diakses Pada Tanggal 29 Maret 2023.
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/JAP/article/view/7257>
- Muhammad Candra Syahputra. (2020). Gerakan Literasi Politik Perempuan Nahdlatul Ulama Dalam Menyambut Pemilihan Umum 2019-2020. [Online]. Diakses Pada Tanggal 28 Maret 2023.
<https://jurnalnu.com/index.php/as/article/view/216>
- Muhammad Ridha. (2019). Literasi Politik dan Masa Depan Demokrasi. [Online] Diakses dari 10 Mei 2019.
https://www.researchgate.net/publication/332821008_Literasi_Politik_dan_Masa_Depan_Demokrasi.
- M Yusuf. (2016). Perkembangan Budaya Politik Di Indonesia. [Online]. Diakses Pada Tanggal 29 Maret 2023.
<https://ojs.serambimekkah.ac.id/serambi-ilmu/article/view/218>
- Nora Eka Putri (2017). Dampak Literasi Politik Terhadap Partisipasi Pemilih Dalam Pemilu. [Online]. Diakses Pada Tanggal 28 Maret 2023.
<https://www.jptam.org/index.php/jptam/article/view/4169>
- Priyanto, Dwi. (2008). *Mandiri Belajar SPSS Untuk Analisis Dan Uji Statistika*. Yogyakarta: Media Komunikasi.
- Program Studi PPKn. (2022). Tujuan PPKn. [Online]. Diakses dari 22 September 2022. <http://pkn.fkip.unila.ac.id/profil/renstra/>.
- Riduan dan Akdon. (2009). *Rumus Dan Data Dalam Aplikasi Statistika*. Bandung: Alfabeta.
- Saleh Al Hamid, dkk. (2022). Penguatan Literasi Politik Masyarakat Di Desa Huntu Barat Kabupaten Bone Bolango. [Online]. Diakses Pada Tanggal 28 Maret 2023.
<https://e-journal.unbita.ac.id/home/index.php/J-PMas/article/view/23>

- Sarwono, J. (2017). *Mengenal Prosedur-Prosedur Populer Dalam SPSS 23*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Sastroatmodjo, Sidijono. (1995). *Perilaku Politik*. Semarang: IKIP Semarang Press.
- Sujarweni, V. Wiratna. (2015). *SPSS Untuk Penelitian*. Yogyakarta: PUSTAKABARUPRESS.
- Sujarweni, V. Wiratna. (2022). *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: PUSTAKABARUPRESS.
- Sumanto. (2014). *Teori dan Aplikasi Metode Penelitian*. Yogyakarta: CAPS (Center Of Academic Publishing Service).
- Sunarto,dkk. (2021). Pelatihan Penguatan Partisipasi Politik dalam Mengawal Kebijakan Publik. [Online]. Diakses Pada Tanggal 29 Maret 2023.
<https://ejournal.uniska-kediri.ac.id/index.php/CENDEKIA/article/view/1961/1242>
- Sutrianto., Rahmawan, N., Hadi, S., Fitriyono, H. (2016). *Panduan Gerakan Literasi Sekolah Di Sekolah Menengah Atas*. Jakarta: Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Atas Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Tedi Erviantono. (2020). Budaya Politik, Uang, dan Pilkada. [Online]. Diakses Pada Tanggal 29 Maret 2023.
<https://transformative.ub.ac.id/index.php/jtr/article/view/144>
- Thomas Tokan Pureklolon. (2021). Eksistensi Budaya Politik Di Indonesia: Sebuah Kajian. [Online]. Diakses Pada Tanggal 29 Maret 2023.
<https://www.ejurnal.ubk.ac.id/index.php/communitarian/article/viewFile/147/105>
- Wahidin, Unang. (2018). *Implementasi Literasi Media Dalam Proses Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Dan Budi Pekerti*. Jurnal Pendidikan Islam,7(2), 4.
- Wibowo. 2012. *Manajemen Kerja*. Jakarta: Rajawali Press.
- Yana Suryana. (2020). Pengaruh Pelaksanaan Pemilu Serentak Terhadap Budaya Politik. [Online]. Diakses Pada Tanggal 29 Maret 2023.
<https://ejournal.unib.ac.id/supremasihukum/article/view/10116>
- Yusnedi Yusnedi, dan Sabrina Utami. (2019). Analysis Of Local Political Culture And Political Participation In The Implementation Of 2019 General Elections In Kota Lama, Rengat Barat. [Online]. Diakses Pada Tanggal 29 Maret 2023.
<https://journal.stieindragiri.ac.id/index.php/jmbi/article/view/109>